



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU**

Jalan Pembangunan No. 13
Telp. (0736) 2124 – 23049, Fax (0736) 23049

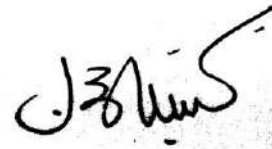
KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIN) Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Bengkulu telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LAKIN, diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIN ini disampaikan terima kasih.

Bengkulu, Januari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu



Ns. GUSTI MINIARTI, S.Kep., MH

Pembina Utama Muda
NIP.19680801 198703 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	6
a. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	6
b. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI	7
c. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	8
d. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE) ORGANISASI.....	9
e. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	16
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	18
a. PERENCANAAN STRATEGIS	18
b. TUJUAN	19
c. SASARAN.....	19
d. INDIKATOR KINERJA.....	19
e. STRATEGI	19
f. KEBIJAKAN.....	20
g. ROGRAM/KEGIATAN RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	21
h. PERJANJIAN KINERJA	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	26
a. CAPAIAN KINERJA	28
b. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA.....	49
c. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	65
BAB IV PENUTUP.....	69
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	21
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja DP3APPKB Provinsi Bengkulu TA 2025.....	24
Tabel 3.1 Tujuan/Sasaran, Indikator Kinerja DP3APPKB Provinsi Bengkulu.....	27
Tabel 3.2 Kabupaten/Kota Layak Anak yang mendapatkan penghargaan KLA 2025.....	37
Tabel 3.3 Jumlah anak didik di LPKA Kelas II Malabero Bengkulu.....	38
Tabel 3.4 Data Kekerasan terhadap Anak Provinsi Bengkulu.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pohon Kinerja	8
Gambar 1.2 Diagram kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Provinsi Bengkulu.....	17
Gambar 1.3 Struktur Organisasi DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2025.....	20
Gambar 3.1 Hasil LHE AKIP Inspektorat DP3APPKB Tahun 2025.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

a) DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tipologi A, artinya memiliki peran strategis dan ruang lingkup kerja yang luas. DP3APPKB dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, DP3APPKB berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, penerapan, serta inovasi dan inovasi daerah. DP3APPKB dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Anak Provinsi Bengkulu memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) kepada Gubernur Bengkulu yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2021 – 2026. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu, Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LAKIN diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- b. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu guna membantu pelayanan kepada

masyarakat lebih baik.

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan dan perlindungan anak.

b) KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

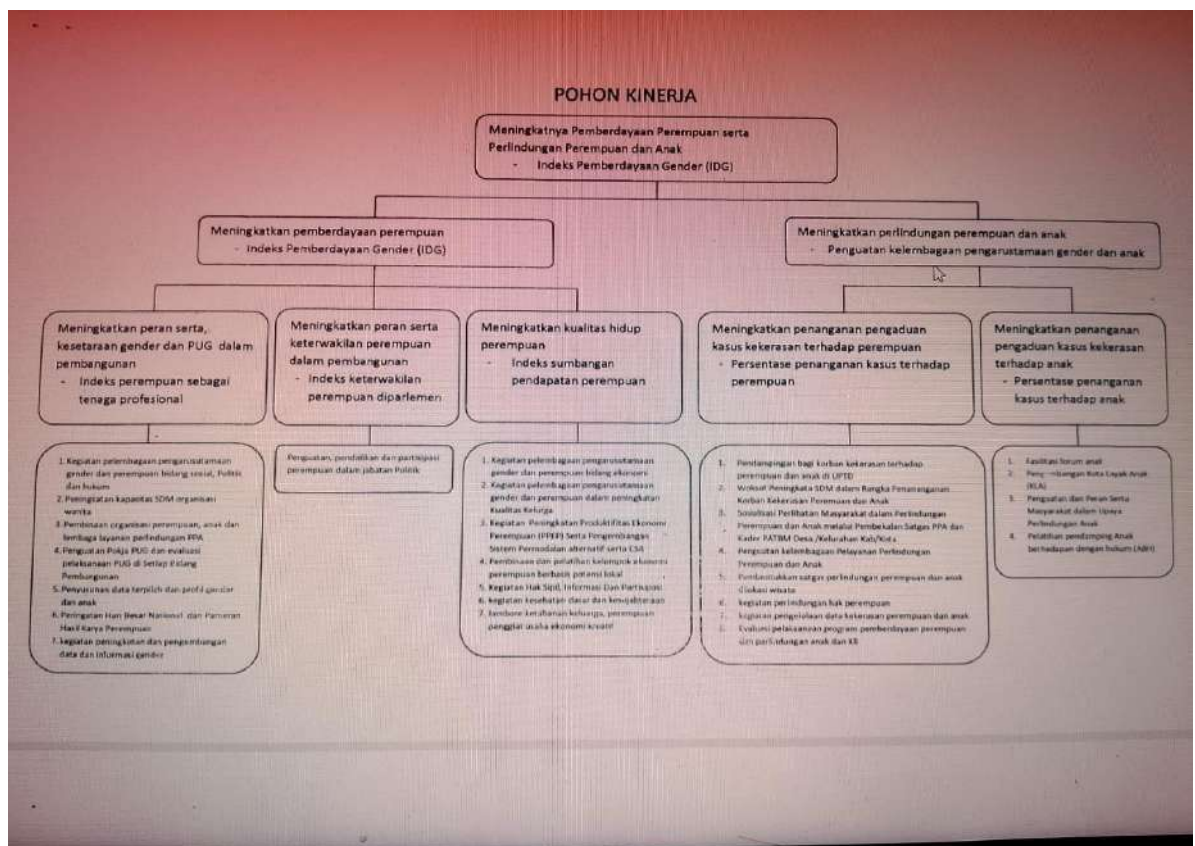
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berkedudukan di jalan pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Kota Bengkulu. Sesuai Pasal 543 Pergub 21/2024, tugas pokok DP3APPKB adalah: *“urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.”* Dengan tugas pokok tersebut, DP3APPKB menjadi *think tank* Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berfungsi menyiapkan dokumen, data, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang terukur, berbasis bukti, serta berorientasi pada inovasi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, DP3APPKB menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

1. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. pengkajian, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. pembinaan pegawai Dinas;
5. penyampaian telaahan masalah serta kepegawaian Dinas kepada Dinas;
6. pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara tepat sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai secara berkala dan berkelanjutan;
7. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan,

- umum, kepegawaian dan hubungan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
8. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 9. penyusunan rumusan dan menetapkan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat, akuntabilitas kinerja pemerintahan, LKPJ, LPPD, laporan keuangan dan laporan kinerja daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 10. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

c) ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu tercantum dalam gambar pohon kinerja dibawah ini :



Gambar 1.1 : Pohon Kinerja Sumber Data : Perencanaan DP3APPKB

d) PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE) YANG DIHADAPI ORGANISASI

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) PROVINSI BENGKULU merefleksikan kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas capaian kinerja yang ada. Permasalahan ini diidentifikasi melalui evaluasi kinerja periode 2020-2024, data spesifik terkait urusan dinas, serta kondisi internal perangkat daerah. Secara umum, permasalahan pelayanan DP3APPKB Provinsi Bengkulu dapat dikategorikan sebagai berikut:

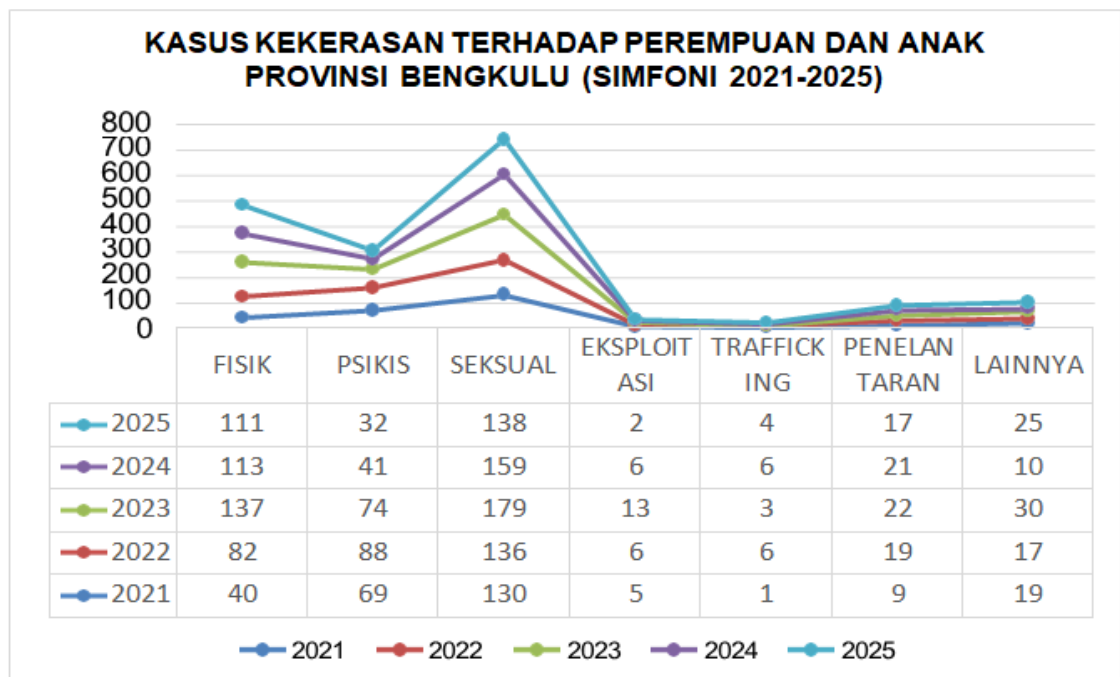
1. Permasalahan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender

- **Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG):** Meskipun Indeks Pembangunan Gender (IPG) PROVINSI BENGKULU menunjukkan tren positif (94.24 pada 2024) dan berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, namun IDG (63.13 pada 2024) masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu (70.06) dan nasional (76.90). Hal ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan. Dalam hal kesetaraan gender, meskipun ada upaya untuk memberdayakan perempuan, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam memastikan kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa budaya dan norma sosial yang mengakar di masyarakat seringkali membatasi peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun politik. Keterbatasan ini menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka, yang berkontribusi pada kesenjangan gender yang masih ada di provinsi ini.
- **Rendahnya Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan**
Data menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang berarti bahwa masih terdapat kesenjangan gender dalam akses terhadap kesempatan ekonomi. Selain itu, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses posisi kepemimpinan baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan, melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan di ekonomi dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif.
- **Belum Optimalnya Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)**
Meskipun ada peningkatan Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG), masih diperlukan upaya yang lebih merata dalam pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan mengenai konsep gender dan PUG dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

2. Permasalahan dalam Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak

- Peningkatan Kasus Kekerasan:

Berdasarkan data yang dikelola oleh UPTD PPA Provinsi Bengkulu melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) selama 4 (empat) tahun terakhir, pada tahun 2021 sebanyak 198 kasus terdiri dari 143 Kasus kekerasan terhadap anak (KTA) dan 54 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP), tahun 2022 sebanyak 259 kasus terdiri dari 175 kasus KTA dan 87 KTP, tahun 2023 sebanyak 370 kasus terdiri dari 241 kasus KTA dan 132 kasus KTP dan tahun 2024 sebanyak 271 kasus terdiri dari 179 kasus KTA, 93 kasus KTP, 6 kasus TPPO dan 93 kasus ABH. Data di atas menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Hal ini tampak semakin memburuk untuk fenomena makin banyaknya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak tiap tahunnya. Namun dari segi berani melapor, berani bertindak dan ditindak, hal ini menunjukkan kemajuan bahwa Masyarakat paham dan berani untuk menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tidak kembali menganggap kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi hal yang wajar



Gambar 1.2 Diagram kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak 2021 sd 2025

Sumber data : SIMFONI PPA dikelola UPTD PPA Provinsi Bengkulu, 2025

- Tingginya Perkawinan Usia Anak

Isu perkawinan usia anak masih menjadi masalah serius yang memicu peningkatan angka kelahiran remaja (ASFR 15-19), yang mana ASFR 15-19 di BENGKULU (26.7 pada

2024) masih jauh di atas target (20). Kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak, serta tekanan sosial dan ekonomi keluarga, sering mendorong pernikahan dini.

- **Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Anak**

Masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak-haknya secara penuh, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Kasus kekerasan terhadap anak, termasuk eksploitasi ekonomi dan pekerja anak, masih ditemukan di beberapa daerah, yang mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan sosial bagi anak-anak di Bengkulu.

3. Permasalahan dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

- **TFR Cenderung Meningkat**

Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan kecil (2.26 pada 2024, sedikit di atas target 2.15), mengindikasikan bahwa upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk perlu diintensifkan untuk mencapai angka ideal.

- **Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) cenderung meningkat**

Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan. Mulai dari tahun 2022, capaian Provinsi Bengkulu melebihi target dengan pencapaian di 34,3 hingga diakhir renstra pada tahun 2024 capaian Provinsi Bengkulu masih melebihi target 21,5 walaupun tidak terlalu tinggi. Akan tetapi ini menunjukkan bahwa masih banyaknya anak-anak yang masih melakukan pernikahan dini.

- **Tren Angka Penurunan Stunting**

Berdasarkan data SSGI selama 4 (empat) tahun terakhir, pada Tahun 2021 sebesar 22,1%, Tahun 2022 Menurun menjadi 19,8%, tetapi pada Tahun 2023 Mengalami Kenaikan sebesar 20,2% tetapi Tahun 2024 Mengalami penurunan kembali sebesar 18,8%. Data di atas menunjukkan mengalami tren penurunan yang cukup landai setiap Tahunnya. Dikarenakan kesadaran publik dan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting masih sedikit karena Keluarga Resiko Stunting belum memiliki kesadaran yang tinggi.

4. Permasalahan Internal Perangkat Daerah:

- **Kualitas Data dan Sistem Informasi**

Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, serta analisis data terpilah (data pilah gender) masih menjadi kendala dalam perumusan kebijakan yang berbasis bukti.

- **Kondisi Sarana dan Prasarana (Sarpras)**

Meskipun gedung dan bangunan dalam kondisi baik, sebagian besar aset peralatan dan mesin (sekitar 42% berusia di atas 13 tahun) mulai menua dan berpotensi rusak berat, memerlukan perencanaan pemeliharaan intensif, peremajaan, atau penggantian untuk menjaga kualitas pelayanan tetap optimal.

Pendekatan dan Strategi Penanganan dari permasalahan diatas dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Kolaborasi Multisektor:

Diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, media, sektor swasta, dan mitra internasional.

2. Edukasi dan Advokasi:

Kampanye edukasi dan advokasi tentang hak-hak perempuan dan anak serta strategi pencegahan perlu digalakkan.

3. Sistem Data:

Penyediaan sistem data pencatatan dan pelaporan yang terpilah untuk anak dan perempuan penting untuk penyusunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

4. Penguatan Layanan:

Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan untuk perlindungan perempuan dan anak, termasuk melalui inovasi dan call center khususnya pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pelaksana teknis operasional perlindungan perempuan dan anak

5. Peningkatan Ketahanan Keluarga:

Mengatasi masalah stunting melalui perbaikan pola makan dan ketahanan pangan keluarga.

Isu Strategis Daerah dan Perangkat Daerah

Merujuk pada isu strategis Provinsi Bengkulu melalui RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025 - 2029, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu mendukung fokus isu Ketimpangan Dalam Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, Kesempatan Kerja, Kesenjangan Gender, serta Perlindungan Anak dan Penyandang Disabilitas. Ketimpangan dalam kualitas dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta perlindungan anak dan penyandang disabilitas di Provinsi Bengkulu menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun ada kemajuan dalam berbagai sektor pembangunan, masih terdapat disparitas yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antar kelompok sosial ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal kesetaraan gender, meskipun ada upaya untuk memberdayakan perempuan, namun masih

banyak tantangan yang dihadapi dalam memastikan kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa budaya dan norma sosial yang mengakar di masyarakat seringkali membatasi peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun politik. Keterbatasan ini menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka, yang berkontribusi pada kesenjangan gender yang masih ada di provinsi ini. Begitu juga dengan perlindungan terhadap anak dan penyandang disabilitas yang masih memerlukan perhatian khusus. Anak-anak di daerah terpencil sering kali mengalami keterbatasan dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, penyandang disabilitas sering kali mengalami stigma sosial dan kesulitan dalam mengakses layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa anak-anak dan penyandang disabilitas dapat memperoleh hak-hak mereka, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang setara.

Ketimpangan yang terjadi dalam berbagai sektor ini memerlukan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terintegrasi untuk mencapainya. Adapun pendekatan dan strategi yang perlu diambil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1) Kolaborasi Multisektor:

Diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu

2) Edukasi dan Advokasi:

Kampanye edukasi dan advokasi tentang hak-hak perempuan dan anak serta strategi pencegahan perlu digalakkan.

3) Sistem Data:

Penyediaan sistem data pencatatan dan pelaporan yang terpilah untuk anak dan perempuan penting untuk penyusunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

4) Penguatan Layanan:

Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan untuk perlindungan perempuan dan anak, termasuk melalui inovasi dan call center khususnya pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pelaksana teknis operasional perlindungan perempuan dan anak

5) Peningkatan Ketahanan Keluarga:

Mengatasi masalah stunting melalui perbaikan pola makan dan ketahanan pangan keluarga. Menyoroti isu-isu strategis internasional, nasional dan daerah, DP3APPKB Provinsi Bengkulu untuk periode 2025-2029 mengarahkan fokus intervensi dan alokasi sumber daya dan Berdasarkan hasil evaluasi Renstra periode 2020–2024, survei internal dan eksternal, analisis lingkungan

strategis (global, nasional, dan regional), serta telaahan terhadap dokumen RPJMD dan RTRW/KLHS, maka terdapat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 2025–2029 yaitu :

1. Strategi PUG masih dilaksanakan parsial dan belum sesuai dengan mandat RPJMN dan RPJMD

Belum optimalnya implementasi PUG , sehingga pelaksanaan atas kebijakan/ program/ kegiatan yang responsif gender belum sepenuhnya mendukung indikator pembangunan responsif gender secara optimal. Dalam hal kesetaraan gender, meskipun ada upaya untuk memberdayakan perempuan, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam memastikan kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa budaya dan norma sosial yang mengakar di masyarakat seringkali membatasi peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun politik. Keterbatasan ini menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka, yang berkontribusi pada kesenjangan gender yang masih ada di provinsi ini. Peningkatan Ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan. Penguatan PUG dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan.

Penguatan lingkungan strategi untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektifitas dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan pengetahuan, peningkatan transparan dan akuntabilitas.

Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan kapasitas kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang dan pembangunan.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan gender dalam akses terhadap kesempatan ekonomi. Selain itu, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses posisi kepemimpinan baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

3. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Eksploitasi Anak yang semakin kompleks

Angka kekerasan yang semakin meningkat serta kompleks, baik fisik, psikis, maupun seksual, masih menjadi masalah serius, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Serta anak rentan menjadi korban kekerasan, perdagangan manusia, penculikan, pemerkosaan, eksploitasi ekonomi dan pekerja anak.

Perlindungan anak juga masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan daerah. Meskipun berbagai program telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak-haknya secara penuh, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Kasus kekerasan terhadap anak, termasuk eksploitasi ekonomi dan pekerja anak, masih ditemukan di beberapa daerah, yang mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan sosial bagi anak-anak di Bengkulu.

4. Perkawinan Anak

Perkawinan Anak masih menjadi fenomena yang cukup tinggi, yang berakibat pada meningkatnya angka putus sekolah serta menurunnya kualitas hidup perempuan di usia produktif.

5. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19):

Provinsi Bengkulu ini menunjukkan bahwa masih banyaknya tugas kita bersama dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.

6. Angka Kelahiran Total (TFR)

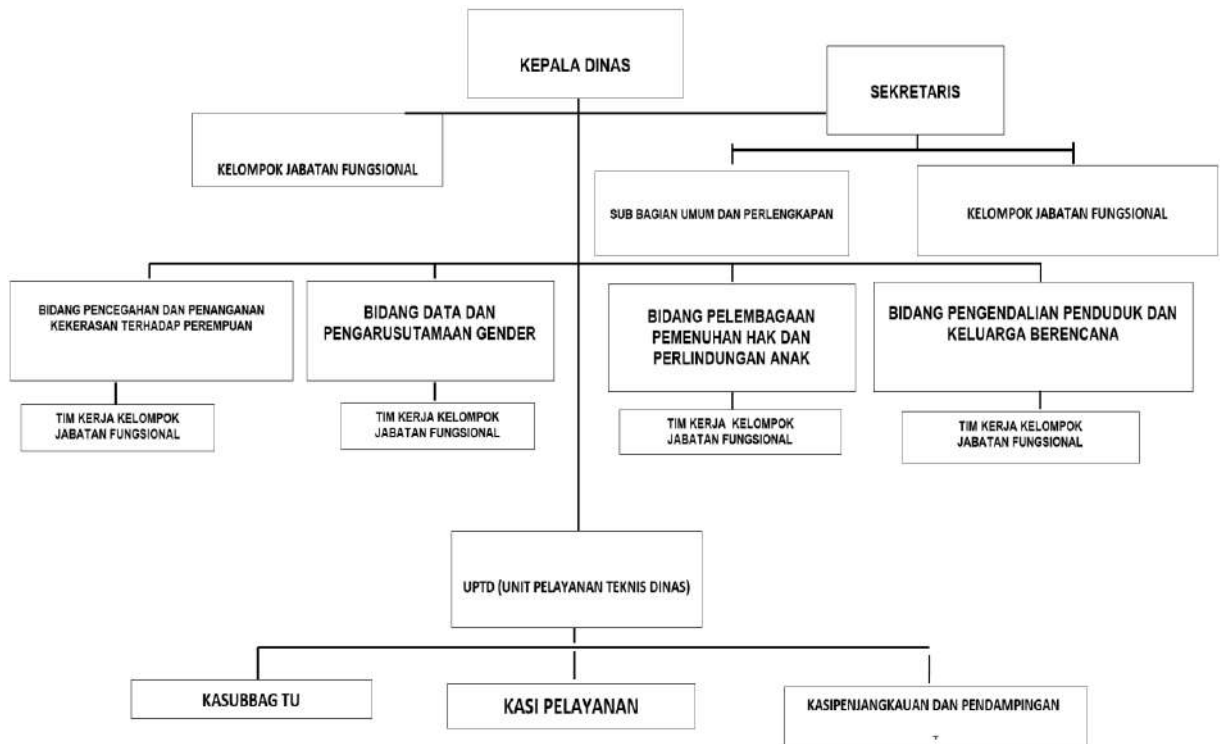
Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan kecil (2.26 pada 2024, sedikit di atas target 2.15), mengindikasikan bahwa upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk perlu diintensifkan untuk mencapai angka ideal.

7. Stunting dan Kesehatan Anak

Stunting masih menjadi perhatian serius Pemerintah Baik Pusat hingga Pemerintah Daerah dalam pembangunan kesehatan dan sumber daya manusia. Beberapa strategi penanganan yang telah dilakukan dengan Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting. Serta konvergensi, kolaborasi dan koordinasi antar pemerintah, masyarakat dan stakeholder untuk mencapai target penurunan stunting. Sebagian masyarakat masih belum memiliki pemahaman, pengetahuan dan perilaku masyarakat terkait stunting.

e) Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Gambar 1.3 : Struktur Organisasi DP3APPKB Provinsi Bengkulu 2025



Struktur organisasi DP3APPKB Provinsi Bengkulu berdasarkan Pergub 21/2024 terdiri atas:

1) Kepala Dinas

Pemimpin tertinggi yang mengoordinasikan seluruh fungsi DP3APPKB.

2) Sekretariat

Subbagian Umum dan Perlengkapan

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Sekretariat berfungsi memberikan dukungan administrasi umum, perencanaan internal, keuangan, dan pengelolaan sumber daya aparatur.

3) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Bidang ini menjadi pusat koordinasi pencegahan, perlindungan perempuan serta meningkatkan kualitas keluarga.

4) Bidang Data dan Pengarustamaan Gender (PUG)

Bidang ini membidangi perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, fasilitasi dan distribusi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi data, dan penyediaan layanan gender.

5) Bidang Pelembagaan dan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang ini membidangi perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

- 6) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bidang ini melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang penegndalian penduduk, advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak
Unit ini melaksanakan sebagian kewenangan teknis desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas serta perpanjangan tugas dan teknis dibawah kewenangan Dinas.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
Terdiri atas pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat, penata kependudukan dan KB, Perencana, Analis keuangan pusat dan Daerah dan Perawat yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu sehingga Dinas dituntut memiliki aparatur yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Jumlah dan komposisi SDM yang diuraikan dalam Renstra ini menggambarkan kondisi aktual pada saat dokumen Renstra 2025–2029 disusun, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pengembangan kapasitas aparatur untuk periode lima tahun mendatang.

Berdasarkan rekapitulasi kepegawaian, jumlah ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah 74 orang dengan sebaran sebagai berikut:

- Berdasarkan golongan, mayoritas ASN berada di Golongan III (83,8%), diikuti Golongan IV (14,9%), sedangkan Golongan II hanya 1,4%. Kondisi ini menunjukkan dominasi pegawai pada level menengah dengan pengalaman kerja yang cukup matang.
- Berdasarkan pendidikan, lebih dari separuh pegawai berpendidikan S1 (67,6%), diikuti S2 (23%), untuk pendidikan D3 sebanyak 5,4 % dan SMA sebanyak 4,1 %. Meski demikian, komposisi ini mencerminkan kapasitas akademik yang relatif baik, dengan peluang penguatan melalui peningkatan jumlah pegawai sarjana.
- Berdasarkan jenis kelamin, ASN perempuan lebih banyak (83,8%) dibandingkan laki-laki (16,2%). Komposisi ini menunjukkan keterwakilan gender yang tinggi, Jumlah keterwakilan perempuan yang sempurna akan memberikan keseimbangan perspektif dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERENCANAAN KINERJA

a) PERENCANAAN STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dimaksudkan sebagai salah satu dokumen perencanaan yang dibuat berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) tanggal 14 November 2025 Nomor B/37/AA.01/2025 Tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Tahun 2025 dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Peran kelembagaan DP3APPKB sebagai Penanggung jawab urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis, DP3APPKB berperan dalam mengharmoniskan lintas sektor pembangunan agar selaras dengan visi, misi, serta kebijakan pembangunan daerah, dengan demikian, LAKIN DP3APPKB tidak hanya merupakan dokumen internal kelembagaan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti mandat politik pembangunan hasil Pilkada serentak 2024 yang berakar dari aspirasi masyarakat.

VISI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Provinsi Bengkulu 2025-2029 yaitu *“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan”*. Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Bengkulu sebagai provinsi yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut mencakup penghayatan akan nilai-nilai religius, pencapaian kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan harmonisasi sosial dalam masyarakat.

MISI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu mendukung misi Kepala Daerah yaitu *Misi 3*: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.

b) TUJUAN

1. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
2. Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan serta TPPO
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta TPPO
4. Meningkatkan laju pengendalian pertumbuhan penduduk
5. Meningkatnya tata kelola kinerja DP3APPKB

c) SASARAN

1. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
2. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan
3. Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak
4. Meningkatnya laju pengendalian pertumbuhan penduduk
5. Nilai Evaluasi SAKIP DP3APPKB

d) INDIKATOR KINERJA

1. Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
2. Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan
3. Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan
4. Total Fertility Rate (TFR) Angka Kelahiran Total 15 s.d 49
5. Nilai evaluasi SAKIP DP3APPKB

e) STRATEGI

- Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dapat menciptakan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Dengan keterwakilan yang lebih baik dari perspektif perempuan, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua anggota masyarakat.

- Peningkatan partisipasi aktif perempuan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Sebagai negara dengan populasi perempuan yang signifikan, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peran aktif perempuan dalam berbagai sektor, yaitu dengan cara : Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan, Kebijakan Pro-Gender di Tempat Kerja, Dukungan untuk Kewirausahaan Perempuan, Peningkatan Kesadaran Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Digital
- Pemenuhan, perlindungan hak anak dan perempuan bebas dari kekerasan. Fokus diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta penanganan komprehensif terhadap korban kekerasan secara terintegrasi.
- Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan
Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan melibatkan beberapa langkah penting yaitu pelatihan dan sertifikasi terkait PUG untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan berkeadilan, kerjasama lintas sektir, analisis gender dalam penyusunan kebijakan, serta partisipasi masyarakat terkait kebijakan PUG.

f) KEBIJAKAN

- Meningkatkan kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender, penguatan kelembagaan, dan partisipasi perempuan.
- Mengoptimalkan koordinasi, pengelolaan data terpilah, serta kampanye publik tentang gender, anak, dan keluarga
- Memperkuat ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, dan kemitraan lintas sektor.
- Memperluas layanan perlindungan anak serta pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

g) PROGRAM/KEGIATAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel 2. 1
Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)
<u>Tujuan 1:</u> Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi <u>Sasaran 1:</u> Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	-Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi -Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	70,07	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi - Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan	38.053.000 495.377.190
<u>Tujuan 2 :</u> Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan serta TPPO <u>Sasaran 2 :</u> Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan	- Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan - Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan	97,5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi - Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi - Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi - Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELUARGA - Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	99.225.000 179.950.000 170.820.000 34.510.000 35.000.000 274.771.000 32.000.000

<u>Tujuan 3</u> : Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta TPPO <u>Sasaran 3</u> : Meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	- Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan - Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	95	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK - Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi 79.131.000 - Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi 81.415.000 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi 62.275.000 - Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK kewenangan provinsi 120.710.000 - Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK kewenangan 34.510.00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - Penyediaan data gender dan anak provinsi 21.790.000	
<u>Tujuan 4</u> : Meningkatkan laju pengendalian pertumbuhan penduduk <u>Sasaran 4</u> : Meningkatkan kesehatan reproduksi	- Total fertility rate (TFR) angka kelahiran total 15 s.d 49 - Total fertility rate (TFR) angka kelahiran total 15 s.d 49	1,56	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - Penyerasian kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap pembanguna keluarga berencanaa bangga kencana 233.000.000 - Penyusunan profil program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga kencana) 26.448.200 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (kb) - Fasilitasi kerjasama dengan stakeholders dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE program bangga kencana 200.000.000	
<u>Tujuan 5</u> : Meningkatkan tata kelola kinerja DP3APPKB <u>Sasaran 6</u> :Nilai evaluasi SAKIP DP3APPKB	-Nilai Evaluasi SAKIP DP3APPKB -Nilai Evaluasi SAKIP DP3APPKB	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 105.000.000 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000 - Evaluasi kinerja perangkat daerah 20.000.000 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 8.566.911.960 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan 67.200.000 - Pelaksanaaan barang milik daerah pada SKPD 9.600.000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.000.000 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 30.000.000 - 35.000.000 - 45.000.000	

			- Penyediaan peralatan rumah tangga	25.000.000
			- Penyediaan bahan logistik kantor	0
			- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99.400.000
			- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	985.896.000
			- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan SKPD	100.000.000
			- Pengadaan mebel	6.700.000
			- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	123.000.000
			- Penyediaan jasa surat menyurat	8.160.000
			- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	293.000.000
			- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	70.575.000
			- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	90.700.000
			- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	10.000.000
			- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
			- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	

h) PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu Tahun 2025 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas bersama Gubernur. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025 mengacu kepada Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu dan Renstra DP3APPKB Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 yang diturunkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai dasar untuk mengukur kinerja untuk Tahun 2025. Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Kepala Dinas telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2025, merupakan perjanjian kinerja antara Gubernur Bengkulu dengan Kepala DP3APPKB sesuai RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Tujuan 1: Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	70,07
	Sasaran 1.1: Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	70,07
2	Tujuan 2: Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan serta TPPO	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pelayanan pendampingan	97,5
	Sasaran 2.1: Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan	97,5
3	Tujuan 3: Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Serta TTPO	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	95
	Sasaran 3.1: Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	95
4	Tujuan 4: Meningkatnya Laju Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Total fertility rate (TFR) angka kelahiran total 15 s.d 49	1,56
	Sasaran 4.1: Meningkatnya kesehatan reproduksi	Total fertility rate (TFR) angka kelahiran total 15 s.d 49	1,56
5	Tujuan 5: Meningkatnya Tata Kelola Kinerja DP3APPKB	Nilai Evaluasi SAKIP	A
	Sasaran 5.1: Nilai Evaluasi SAKIP DP3APPKB	Nilai Evaluasi SAKIP	A

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 10.731.142.960,-	APBD
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 533.430.190,-	APBD
3. Program Perlindungan Perempuan	Rp. 794.276.000,-	APBD/DAKNF
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 32.000.000,-	APBD
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 21.790.000,-	APBD
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 160.546.000,-	APBD
7. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 217.495.000,-	APBD/DAKNF
8. Program Pengendalian Penduduk	Rp. 259.448.200,-	APBD
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 200.000.000,-	DAK NF/BOKB

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah yang diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 dengan memperhatikan identifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ada dalam Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 dan RKT tahun 2025.

Untuk mendukung kegiatan dan program pembangunan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut, dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan 2025 tersebut merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu tahun 2025 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu yang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi aktualisasi dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat, hingga sampailah pada saat pertanggung jawaban pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diemban.

Pada Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2025 menyajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2025. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Perjanjian Kinerja DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Capaian Tujuan/Sasaran dan Indikator kinerja DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI 2025	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Tujuan 1: Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	70,07	n/a	75,69	70,48
	Sasaran 1.1: Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	70,07	n/a	75,69	70,48
2	Tujuan 2: Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan serta TPPO	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pelayanan pendampingan	97,5	97,5	100%	100%
	Sasaran 2.1: Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan	97,5	97,5	100%	100%
3	Tujuan 3: Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Serta TTPO	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	95	95	100%	100%
	Sasaran 3.1: Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	95	95	100%	100%
4	Tujuan 4: Meningkatnya Laju Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Total fertility rate (TFR) angka kelahiran total 15 s.d 49	1,56	n/a	2,27	2,26
	Sasaran 4.1: Meningkatnya kesehatan reproduksi	Total fertility rate (TFR) angka kelahiran total 15 s.d 49	1,56	n/a	2,27	2,26
5	Tujuan 5: Meningkatnya Tata Kelola Kinerja DP3APPKB	Nilai Evaluasi SAKIP	A	BB	A	A
	Sasaran 5.1: Nilai Evaluasi SAKIP DP3APPKB	Nilai Evaluasi SAKIP	A	BB	A	A

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. BIDANG DATA DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025	REALISASI 2024	REALISASI 2025
Tujuan 1: Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	70,07	75,69	n/a
Sasaran 1.1: Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	70,07	75,69	n/a
Tujuan 3: Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Serta TTPO	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	95	100	95
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	95	100	95

Bidang data dan PUG mendukung tujuan/sasaran strategis :

1. Tujuan satu dan sasaran strategis satu dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 70,07% dengan realisasi 2025 sebesar n/a. Capaian realisasi untuk tujuan satu dan strategis satu di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang biasanya di perkirakan rilis di tahun berikutnya di bulan Mei. Untuk realisasi tujuan satu dan sasaran satu di tahun 2024 sebesar 75,69% dengan target sebesar 53,13%. Hal ini menjadi salah satu sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dikarenakan data tersebut dapat menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Mengingat bahwa upaya pemberdayaan gender adalah merupakan kebijakan nasional yang juga secara konsisten dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka tentunya hal ini merupakan salah satu target capaian kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka pengarusutamaan gender terutama memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Tujuan tiga dan sasaran tiga dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 95% dengan realisasi 2025 sebesar 95%. Capaian realisasi untuk tujuan tiga dan sasaran tiga salah satu nya diperoleh dari Bidang data dan PUG. Untuk realisasi tujuan tiga dan sasaran tiga tahun 2024 sebesar 100% dengan target 100 %. Hal ini menjadi salah satu tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta TTPO dalam rangka meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan

kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak.

Program dan kegiatan dari Bidang Data dan PUG untuk mendukung tujuan satu, sasaran satu dan tujuan tiga dan sasaran tiga sebagai berikut :

A. Program	: Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Provinsi
Kegiatan	: Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: Penyediaan Data Gender Dan Anak Provinsi
Tujuan	: a. Sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengembangkan sendiri sistem pengelolaan data gender dan anak yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak. b. Membangun mekanisme dan mendorong pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi dalam upaya ketersediaan data gender dan anak di Daerah. c. Mendorong pemanfaatan data gender dan anak untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di Daerah.
Sasaran	: Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, Instansi Terkait dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota
Indikator	: Tersedianya 1 Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi
Strategi&Kebijakan	: 1. Metode Perencanaan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Bengkulu Tahun 2025 direncanakan melalui pengumpulan data dari OPD sumber data kemudian diolah sebagai bahan dalam penyusunan buku saku data terpilah dan buku profil gender dan anak.

2. Tahap Kegiatan

a. Sumber Data

Laporan dari seluruh OPD Provinsi dan kabupaten kota selaku produsen data dan instansi vertikal serta stakeholder terkait. Baik melalui koordinasi langsung maupun melalui media cetak dan elektronik.

b. Pengumpulan Data

Tujuannya adalah memperoleh informasi pembuka wawasan yang dapat menggambarkan kondisi, kebutuhan, persoalan yang dihadapi perempuan dan laki-laki terkait dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan, sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan.

c. Pengolahan Data

Hasil pengumpulan data dalam bentuk angka maupun informasi akan diolah agar dapat disajikan lebih informatif dengan berbagai bentuk seperti grafik, diagram ataupun pie. Selanjutnya untuk memetakan isu gender di bidang pembangunan perlu dilakukan dengan menghitung indikator atau indeks untuk menggambarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan di berbagai bidang,

d. Pertemuan Validasi Data.

Pertemuan dengan seluruh OPD sumber data terpilih gender dan anak, untuk memvalidasi serta memverifikasi data yang telah terkumpul.

e. Penyajian Data

Dalam bentuk buku data terpilih gender dan anak serta buku profil gender dan anak serta input data kedalam aplikasi

B. Program	:	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
Kegiatan	:	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan	: Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
Tujuan	: sub kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi adalah : untuk memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Tingkat Mentor pada Tahun 2025.
Sasaran	: Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, Instansi Terkait dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota
Indikator	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi.
Strategi dan Kebijakan	: Metode Perencanaan Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi.
	Tahap Kegiatan
	a. Sumber Data Laporan dari seluruh OPD Provinsi dan kabupaten kota selaku produsen data dan instansi vertikal serta stakeholder terkait. Baik melalui koordinasi langsung maupun melalui media cetak dan elektronik.
	b. Pengumpulan Data Penerimaan manfaat dari sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan provinsi adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi Bengkulu dan pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Bengkulu yang tentunya berakhir pada outcome yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.
C. Kegiatan	: Penyebaran Informasi dan Edukasi melalui Website DP3APPKB, Media Sosial (Facebook, Instagram, Tiktok)
Tujuan	: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan mudah diakses semua kalangan

Sasaran : Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, kota dan kabupaten, masyarakat

Indikator : Mengukur efektifitas penyampaian pesan mencakup 2 aspek yaitu aspek kualitatif dan kuantitatif

2. BIDANG PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (PPKTP)

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Tujuan 1: Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	70,07	75,69	n/a
Sasaran 1: Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	70,07	75,69	n/a
Tujuan 2: Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan serta TPPO	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan	97,5	97,5	97,5
Sasaran 2: Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan	97,5	97,5	97,5

Bidang pencegahan penanganan kekerasan terhadap perempuan (PPKTP) mendukung tujuan/sasaran strategis :

1. Tujuan satu dan sasaran strategis satu dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 70,07% dengan realisasi 2025 sebesar n/a. Capaian realisasi untuk tujuan satu dan strategis satu di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang biasanya di perkirakan rilis di tahun berikutnya di bulan Mei. Untuk realisasi tujuan satu dan sasaran satu di tahun 2024 sebesar 75,69% dengan target sebesar 53,13%. Hal ini menjadi salah satu sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dikarenakan data tersebut dapat menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Mengingat bahwa upaya pemberdayaan gender adalah merupakan kebijakan nasional yang juga secara konsisten dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka tentunya hal ini merupakan salah satu target capaian kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka pengarusutamaan gender terutama memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Tujuan dua dan strategis dua dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 97,5% dengan realisasi sebesar 97,5%. Untuk realisasi tujuan dua dan sasaran dua di tahun 2024 sebesar 100% dengan target 100%. Hal ini menjadi salah satu tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan serta TPPO dan menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang public, domestic, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan.

a. Nama Program/Kegiatan

1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (realisasi anggaran 89,93%)
2. Sub Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggaran Dana DAK 94,35%)
3. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggaran 82,52%)
4. Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Tahun 2025 (non budget)

3. BIDANG PENGENDAIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan serta TPPO	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan	97,5	97,5	97,5
Sasaran 2 : Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan	97,5	97,5	97,5
Tujuan 4: Meningkatnya Laju Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Total fertility rate (TFR) angka kelahiran total 15 s.d 49	1,56	2,2	n/a
Sasaran 4.1: Meningkatnya kesehatan reproduksi	Total fertility rate (TFR) angka kelahiran total 15 s.d 49	1,56	2,2	n/a

Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mendukung tujuan/sasaran strategis :

1. Tujuan dua dan strategis dua dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 97,5% dengan realisasi sebesar 97,5%. Untuk realisasi tujuan dua dan sasaran dua di tahun 2024 sebesar 100% dengan target 100%. Hal ini menjadi salah satu tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan serta TPPO dan menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang public, domestic, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan.
2. Tujuan empat dan sasaran empat dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 1,56 dengan realisasi sebesar n/a. Capaian realisasi untuk tujuan satu dan strategis satu di peroleh dari BKKBN yang biasanya di perkirakan rilis di tahun berikutnya. Untuk realisasi tujuan empat dan sasaran empat di tahun 2024 sebesar 2,2% dengan target sebesar 2,27%. Hal ini menjadi salah satu sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dikarenakan data tersebut merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita pada masa suburnya.

Berikut capaian realisasi anggaran bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025:

1. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

- Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana.

Tujuan	:	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana
Target	:	1 Daerah
Pagu Anggaran	:	Rp. 200.000.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 164.986.485,-
Output	:	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
Outcome	:	Terlaksananya koordinasi TPPS di tingkat provinsi dilaksanakan dalam bentuk: pertemuan, koordinasi, fasilitasi, konsultasi, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung Aksi Konvergensi percepatan penurunan stunting.

2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

Tujuan	:	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
Target	:	1 Dokumen
Pagu Anggaran	:	Rp. 32.000.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 25.499.400,-
Output	:	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
Outcome	:	Tersedianya Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

3. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

- Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.

Tujuan	:	Terlaksananya Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Target	:	1 Dokumen
Pagu Anggaran	:	Rp. 233.000.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 182.411.000,-
Output	:	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BanggaKencana)
Outcome	:	Tersedianya Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BanggaKencana)

- Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

Tujuan	:	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
Target	:	1 Dokumen
Pagu Anggaran	:	Rp. 26.448.200,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 16.087.800,-
Output	:	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Outcome	:	Tersedianya Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

4. BIDANG PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPH DAN PA)

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Tujuan 3: Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Serta TTPO	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	95	100	95
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	95	100	95

Bidang pelebagaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak (PPH dan PA) mendukung tujuan dan sasaran strategis :

1. Tujuan tiga dan sasaran tiga dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 95% dengan realisasi 2025 sebesar 95%. Capaian realisasi untuk tujuan tiga dan sasaran tiga salah satu nya diperoleh dari Bidang data dan PUG. Untuk realisasi tujuan tiga dan sasaran tiga tahun 2024 sebesar 100% dengan target 100 %. Hal ini menjadi salah satu tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta TPPO dalam rangka meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak.

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang PPH dan PA :

1. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

a. Kegiatan Pelembagan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 79.131.000,- dan jumlah realisasi SP2D yang terhimpun per 29 Desember 2025 sebesar Rp.56.446.900 ,- atau sebesar 71,3%. Pada Tahun 2024 penilaian di Tahun 2025 dari 10 Kab/kota di Provinsi Bengkulu ada 3 Kabupaten yang belum sama sekali mendapat predikat dalam evaluasi capaian KLA, sedangkan 7 Kab/kota lainnya mendapatkan predikat Pratama (tingkat awal/level pertama dari Penghargaan KLA) sehingga Provinsi Bengkulu belum mendapatkan Predikat Provila (Provinsi Layak Anak).

Table 3.2 :Kabupaten/Kota Layak Anak yang mendapatkan Penghargaan KLA Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Hasil
1	Bengkulu Kota	Pratama
2	Kabupaten Bengkulu Selatan	Pratama
3	Kabupaten Kepahiang	Pratama
4	Kabupaten Rejang Lebong	Pratama
5	Kabupaten Bengkulu Utara	Pratama
6	Kabupaten Muko Muko	Pratama
7	Kabupaten Seluma	Pratama
8	Kabupaten Bengkulu Tengah	-
9	Kabupaten Kaur	-
10	Kabupaten Lebong	-

Sumber data : Kementerian PPA tahun 2025

b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 81.415.000,- dan jumlah realisasi SP2D yang terhimpun per 29 Desember 2025 sebesar Rp.61.289.000 ,- atau sebesar 75,3%.

Kegiatan yang sudah dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak antara lain :

- a) Menjadi Tim Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Bengkulu
- b) Melaksanakan sosialisasi tentang Hak-hak Anak yang terkoneksi dengan KHA (Konvensi Hak Anak) di beberapa Sekolah Menengah Atas antara lain SMA Sint Carolus, SMA 7 dan SMA Kota Bengkulu. Di Tingkat Taman Kanak-kanak di TK IT UMMY.

2. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 62.275.000,- dan jumlah realisasi SP2D yang terhimpun per 29 Desember 2025 sebesar Rp.60.875.000 ,- atau sebesar 98%.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu telah melaksanakan kegiatan berikut ini:

1. Perlindungan khusus atas Anak Berhadapan Hukum
2. Perlindungan khusus atas anak disabilitas
3. Perlindungan khusus atas anak korban NAFZA
4. Perlindungan khusus atas anak korban kekerasan
5. Perlindungan khusus atas anak eksploitasi ekonomi
6. Perlindungan khusus atas anak penelantaran.

Di bawah ini adalah data jumlah anak didik di LPKA yang merupakan anak berhadapan hukum dari tahun 2022-2025.

Tabel 3.3 : Jumlah anak didik di LPKA Kelas II Malabro Bengkulu

Tahun	Jumlah Anak Didik	Keterangan
2022	86 Orang	Seluruh Anak didik Berjenis Kelamin Laki-laki
2023	87 Orang	
2024	83 Orang	
2025	73 Orang	

Sumber data : LPKA Kelas II Malabero

Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak terdapat beberapa kendala yaitu :

1. Kurangnya kebijakan antara lain kurangnya peraturan-peraturan daerah sebagai landasan hukum
2. Dalam upaya sinkronisasi antar OPD terkait, banyak ditemukan ego sektoral sehingga belum tersinkronisasi.

PUSPAGA

Puspaga adalah singkatan dari Pusat Pembinaan Keluarga. Di Provinsi Bengkulu, rumah puspaga bernama Amanah Raflesia. Program ini dibentuk dengan tujuan untuk melihat dan meninjau issue yang marak terjadi pada anak, remaja dan binaan keluarga yang memiliki

permasalahan termasuk kasus perceraian anak (*broken home*), pernikahan dibawah umur tanpa pekerjaan sehingga membuat tumbuh kembang dan mental anak terganggu. Akibatnya kasus kenakalan dan kriminal anak remaja semakin tinggi.

Bentuk dari pelaksanaan program ini yaitu konsultasi dan pertemuan dengan anak atau keluarga, namun belum terlaksana dikarenakan tempat, fasilitas dan SDM yang mendukung pelaksanaan tersebut tidak ada sehingga program ini belum berjalan sama sekali. .

Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA)

Program DRPPA adalah Program Inovasi KPPPA RI dimana Provinsi Bengkulu mendapatkan stimulan untuk desa percontohan pada tahun 2022 hingga 2024. dari sosialisasi, pembentukan, pelatihan dan monitoring serta evaluasi.

Kabupaten Stimulan terdiri dari :

- 1) Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Desa Datar Ruyung dan Desa Sidodadi
- 2) Kabupaten muko-muko yaitu Desa Lubuk Sanai II dan Desa Sidomulyo

Pada Tahun 2023 Kabupaten Seluma dengan swadaya dan swadana melaksanakan sosialisasi DRPPA di 4 Desa yaitu Desa Sari Mulyo, Desa Sidosari, Sumber Makmur dan Kunti Agung. Namun Kabupaten Seluma membutuhkan pendampingan untuk tahapan pembentukan dan pelatihan SAPA.

Pada Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu melaksanakan Replikasi DRPPA di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu di Desa Semidang dan Desa Nakau.

- Kegiatan Pelembagan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

- | | |
|----------------------|---|
| - Tujuan | : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Kewenangan Provinsi |
| - Target | : 2 Dokumen |
| - Pagu Anggaran | : Rp. 79.131.000,- |
| - Realisasi Anggaran | : Rp. 56.446.900,- |
| - Output | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi |
| - Outcome | : adanya komitmen bersama dalam penilaian KLA, Peran stakeholder dalam mendukung KLA di Di tingkat Kab/Kota |

- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - Tujuan : Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - Target : 10 Orang
 - Pagu Anggaran : Rp. 81.415.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 61.289.000,-
 - Output : Jumlah orang yang mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - Outcome : anak mendapatkan kebebasan terhadap hak-hak mereka dalam layanan peningkatan kualitas hidup

- Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
 - Tujuan : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak Kewenangan Provinsi
 - Target : 2 Dokumen
 - Pagu Anggaran : Rp. 62.275.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 60.875.000,-
 - Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
 - Outcome : berkurang atau menurunnya angka kekerasan Anak serta anak paham cara mengatasi kekerasan Yang terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan Masyarakat.

5. UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan serta TPPO	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan	97,5	97,5	97,5
Sasaran 2 : Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan	97,5	97,5	97,5
Tujuan 3: Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Serta TPPO	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	95	100	95
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	95	100	95

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mendukung tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan dua dan strategis dua dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 97,5% dengan realisasi sebesar 97,5%. Untuk realisasi tujuan dua dan sasaran dua di tahun 2024 sebesar 100% dengan target 100%. Hal ini menjadi salah satu tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan serta TPPO dan menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang public, domestic, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan.
2. Tujuan tiga dan sasaran tiga dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 95% dengan realisasi 2025 sebesar 95%. Capaian realisasi untuk tujuan tiga dan sasaran tiga salah satu nya diperoleh dari Bidang data dan PUG. Untuk realisasi tujuan tiga dan sasaran tiga tahun 2024 sebesar 100% dengan target 100 %. Hal ini menjadi salah satu tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta TPPO dalam rangka meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak.

1. Program Perlindungan Perempuan

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi

Target : Layanan

Capaian : 1 Layanan (100%) Pagu Dana : Rp. 35.000.000,-

Realisasi : Rp. 33.009.000,- (94,31%)

Tujuan Kegiatan : Mengevaluasi pelaksanaan tugas, fungsi, serta efektivitas kerja Satgas PPA Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Target : 2 orang Capaian / 23 orang

Pagu Dana : Rp. 179.950.000,-

Realisasi : Rp. 165.698.925 / (92,08%)

Tujuan Kegiatan :

- Menyediakan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- Memperoleh data dan informasi kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak secara valid

Target kegiatan tercapai dengan penyelenggaraan layanan sesuai fungsi UPTD PPA serta menyelenggarakan kegiatan percepatan penanganan korban kekerasan Perempuan dan anak di Kabupaten yang belum terbentuk UPTD PPA dan belum memperoleh DAK NF PPA yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Mukomuko. Tahun 2025 hanya 1 (satu) Kabupaten yang belum terbentuk UPTD PPA yaitu Kabupaten Lebong.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Target : 5 Layanan / 20 orang

Capaian : 6 Layanan / 23 orang (100%)

Pagu Dana : Rp. 170.820.000,-

Realisasi : Rp. 147.444.500,- (86,31)

Merupakan DAK NF PPA penggunaan Boppa Pelayanan Perempuan berdasarkan Juknis dengan pelaksanaan layanan :

1. pengaduan masyarakat;
2. penjangkauan korban;

3. pengelolaan kasus;
4. penampungan sementara;
5. mediasi; dan
6. pendampingan korban

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Target : 55 orang

Capaian : 55 orang (100%) Pagu Dana : Rp. 34.510.000,-

Realisasi : Rp. 33.979.000,- (98,46%)

Merupakan DAK NF PPA penggunaan Boppa Manajemen perempuan berdasarkan Juknis dengan pelaksanaan peningkatan kapasitas penyelenggara layanan. Kegiatan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perempuan.

2. Program Perlindungan Khusus Anak

a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi

Target : 1 Layanan / 30 orang

Capaian : 6 Layanan / 40 orang (100%) Pagu Dana : Rp. 120.710.000,-

Realisasi : Rp. 88.288.905,- / (73,14)

Merupakan DAKNF PPA penggunaan Boppa Pelayanan Anak berdasarkan Juknis dengan pelaksanaan layanan :

1. Pengaduan masyarakat
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan kasus
4. Penampungan sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan korban

b. Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK kewenangan

Target : 55 orang

Capaian : 55 orang / 100%

Pagu dana : Rp. 34.510.000,-

Realisasi : Rp. 33.165.900,- / 99%

DAKNF PPA penggunaan Boppa manajemen anak berdasarkan juknis dengan pelaksanaan peningkatan kapasitas penyelenggara layanan. Kegiatan pelatihan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual perempuan.

6. SEKRETARIAT

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Tujuan 5: Meningkatnya Tata Kelola Kinerja DP3APPKB	Nilai Evaluasi SAKIP	A	A	BB
Sasaran 5.1: Nilai Evaluasi SAKIP DP3APPKB	Nilai Evaluasi SAKIP	A	A	BB

Sekretariat mendukung tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan lima dan sasaran lima dengan realisasi 2025 adalah BB dengan target A. Capaian ini diperoleh dari hasil penilaian Inspektorat Provinsi Bengkulu mengenai evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented).

Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hasil Evaluasi Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu menunjukkan nilai sebesar 78,25 dengan predikat “BB” atau interpretasi “Sangat Baik”, dengan penjelasan bahwa terdapat gambaran AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung, akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III/koordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,50	30,00	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	30,00	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	15,00	11,55
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50	25,00	20,50
	Nilai Hasil Evaluasi		82,30		78,25
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A		BB

Penjelasan lebih lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Renstra yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja serta Dokumen lainnya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kinerja, yaitu:

- 1) Membuat Crosscutting agar Dokumen perencanaan kinerja memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
- 2) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja
- 3) Dokumen Kinerja dipublikasikan tepat waktu

- b. Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya melakukan pengukuran realisasi kinerja dan rencana aksinya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, yaitu pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

- c. Pelaporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024. Laporan Kinerja telah menyajikan realisasi kinerja dari tahun berjalan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, yaitu

1. LAKIN menjadi kepedulian seluruh pegawai/Tidak ada notulen rapat pembahasan capaian realisasi LAKIN Tahun 2024 dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.
2. Informasi dalam LAKIN dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

- d.. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu :

1. Subbag Keuangan

- Nama Program/Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN (realisasi anggaran 98,74%)
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD (realisasi anggaran 63,21%)
- Nama Program/Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (realisasi anggaran 100%)
- Nama Program/Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor (realisasi anggaran 100%) b.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor (realisasi anggaran 100%)
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (realisasi anggaran 100%)
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD (realisasi anggaran 55,50%)
- Nama Program/Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (realisasi anggaran 96,12%)
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik (realisasi anggaran 72,31%)
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor (realisasi anggaran 91,67%)
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (realisasi anggaran 84,42%)
- Nama Program/Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Advokasi Kebijakan dan Pendampiangn Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (realisasi anggaran 50,70%)
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Advokasi Kebijakan dan Pendampiangn Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (realisasi anggaran 81,23%).

2. Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

3. Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Tujuan : Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah
- Target : 13 Dokumen
- Pagu Anggaran : Rp. 105.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 61.360.238,-
- Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Outcome : Tersusunnya 13 Dokumen Perencanaan Daerah yang Akuntabel

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Tujuan : Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Target : 5 Laporan
- Pagu Anggaran : Rp. 20.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 10.790.000,-
- Output : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Outcome : Tersusunnya 5 laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah yang akuntabel

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perangkat Daerah

- Tujuan : Tersusunnya laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perangkat Daerah
- Target : 3 Laporan
- Pagu Anggaran : Rp. 20.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 5.650.000,-
- Output : Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perangkat Daerah
- Outcome : Tersusunnya 3 laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perangkat Daerah yang akuntabel

3. Subbag Umum dan Perlengkapan

a. Surat masuk dan Surat Keluar

**Jumlah Surat Masuk Dan Surat Keluar 2025
Tahun 2025**

No.	Bulan	Jumlah	
		Surat Masuk	Surat Keluar
1	Januari	37	35
2	Februari	30	134
3	Maret	17	14
4	April	18	21
5	Mei	42	22
6	Juni	45	63
7	Juli	49	86
8	Agustus	42	52
9	September	40	47
10	Oktober	43	144
11	November	50	300
12	Desember	43	290
Total		456	1.208

b. Naik Pangkat Reguler

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 pasal 5 tentang kenaikan pangkat, Pada Tahun 2025 ada **9 orang PNS** yang naik pangkat Reguler.

a. Pindah Tugas PNS

PNS(Pegawai Negeri Sipil) ada yang pindah masuk maupun keluar dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu atas permintaan sendiri. **Ada 5 orang PNS yang pindah masuk (Arie Fermansyah, Imelda Dian Sari, Popin Wijaya, Hani Afifah, Sudigdo) dan ada 1 orang yang pindah keluar (Muhammad Sugiman).**

b. Berkala PNS

Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu setiap tahunnya ada beberapa orang yang mengajukan ke naikan gaji berkala , Tahun 2025 ada 26 orang golongan II, III dan IV yang mendapatkan Kenaikan SK Berkala.

c. Cuti Tahun 2025

Setiap tahun pegawai berhak untuk mendapatkan cuti tahunan ,yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pemerintahan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1976, yang mana berguna untuk memberikan refreasing pada pegawai dalam menghilangkan kejenuhan dalam melaksanakan tugas.Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Ada 83 orang yang melaksanakan cuti Tahunan. Cuti alasan penting sebanyak 4 Cuti alasan penting dan cuti bersalin sebanyak 1.

d. Satyalancana Karya Satya Tahun 2025

Pegawai Negeri sipil berhak untuk mengajukan dan mendapat piagam penghargaan Satyalancana Karya Satya sesuai dengan ketentu yang berlaku dalam pemerintah, yang berguna untuk meningkatkan semangat kerja pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan.Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu ada 5 orang yang mendapatkan piagam satyalancana karya satya untuk tahun 2025.

d. Hukum Disiplin ada 5 Orang

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

1. BIDANG DATA DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

No	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian		Realisasi Kinerja / Capaian Kinerja 2025	Permasalahan dan Kendala	Solusi/ Masukan
			PAGU	REALISASI			
1.	Penyediaan Data Gender Dan Anak Provinsi	tersedianya 1 Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi	21.790.000	21.190.0000	tersedianya 1 Dokumen Data Gender dan Anak	-Pergantian Pengguna Anggaran -Efisiensi anggaran -Gangguan sistem	-
2.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pug Kewenangan Provinsi	tersedianya 1 Laporan PUG	38.053.000	38.053.000	tersedianya 1 Laporan PUG	-Pergantian Pengguna Anggaran -Efisiensi anggaran -gangguan sistem	-
3.	Penyebaran Informasi dan Edukasi	-Penyebaran Informasi dan Edukasi -Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keluarga	-	-	Tersebar nya informasi melalui Website DP3APPKB, Media Sosial (Facebook, Instagram,	-Tidak adanya sarana prasarana yang memadai, (Handphone, kuota)	Tersedia sarana prasarana yang memadai

		berkualitas dan mudah diakses semua kalangan			Tiktok)	Kurangnya SDM yang terlatih	
--	--	--	--	--	---------	-----------------------------	--

2. BIDANG PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (PPKTP)

- Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia layanan

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

Total Pagu : Rp 495.377.190,-

Realisasi hingga Desember 2025 :

Rp445,510,140,-

Persentase Realisasi : 89,93 %

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Hasil Kegiatan
1.	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Perempuan seperti Dharma Wanita Persatuan Provinsi	Undangan Musprov V DWP Provinsi Bengkulu berjumlah 350 orang yang terdiri dari : Peserta Musprov berjumlah 290 Orang, Panitia Musprov berjumlah 40 orang, Petugas Kebersihan	Terlaksana Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
	Bengkulu untuk melaksanakan Musyawarah Provinsi	berjumlah 10 orang, Petugas Keamanan/ Satpol berjumlah 5 PP. dan Petugas Genset berjumlah 5 orang. 1. Penyelenggaraan, Tempat dan Waktu - Musprov diselenggarakan oleh DP3APKB Provinsi Bengkulu dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu. - Musprov diselenggarakan di Gedung Serba Guna Kantor Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pada hari/ tanggal : Rabu / 28 Mei 2025	- Tujuan dilaksanakannya Musprov. Pengurus DWP Bengkulu adalah untuk mengesahkan kepengurusan baru agar dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun Bengkulu secara lebih efektif. - Agar DWP menjadi salah satu penggerak dalam pemberdayaan perempuan.
2.	Sosialisasi Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Membangun Keluarga yang kuat , sejahtera	- Kegiatan dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 06 Oktober 2025 - Lokasi Kegiatan Di Aula Merah Putih Pemda Provinsi Bengkulu (Jl.Pembangunan Padang Harapan, Kota Bengkulu) - Jumlah Peserta Sebanyak 140 org yang terdiri dari OPD terkait, Organisasi Perempuan Dll - Narasumber Berasal dari DP3APKB Prov. Bengkulu, DWP Prov. Bengkulu, Pengadilan Tinggi Agama dan Badan Kepegawaian Provinsi Bengkulu	- Pengaitan Sinergi Lintas Sektor dengan Memperkuat Kolaborasi antar Lembaga Hukum, Lembaga Sosial dan instansi pemerintah untuk membangun sistem perdayaan perempuan dan perlindungan perempuan yang komprehensif dan berkelanjutan - aksi/kegiatan Pemerintah Provinsi dalam rangka Ketahanan Keluarga untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045

3.	Pelatihan Pengolahan Sampah Menjadi Bahan yang Bermanfaat untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga	- Kegiatan dilaksanakan Selasa 21 Oktober 2025 - Di Aula Merah Putih Pemda Provinsi Bengkulu - Jumlah Peserta Sebanyak 130 org yang terdiri dari OPD terkait, Organisasi Perempuan Dll - Narasumber Berasal dari DP3APPKB Provinsi Bengkulu, DWP Provinsi Bengkulu dan organisasi Keterampilan Perempuan	- Meningkatkan Kesejahteraan Secara Menyeluruh melalui Kontribusi Aktif Perempuan - Memotivasi perempuan agar memiliki kemampuan membantu perekonomian keluarga. - Memberi Pengetahuan bagi perempuan tentang cara pengolahan sampah menjadi bahan bermanfaat. - Memberikan ilmu dan pengetahuan kepada perempuan agar berpikir kreatif untuk berwira usaha
4.	Perkasa Membara (Perempuan Bekerja Sama Membantu Rakyat)	- Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat berupa 200 paket sembako - Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat dilaksanakan pada Bulan November sampai Desember.	- Memberdayakan perempuan menjadi agen perubahan untuk membangun keluarga, lingkungan dan masyarakat yang sejahtera, adil dan berkesetaraan gender - Terlaksananya pemberian bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO
5.	Peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ke- 26 Tahun 2025 dengan tema “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045”	- Dilaksanakan pada 9 Desember 2025 Grage Hotel Horizon Bengkulu, Jl. Nala No.142 Anggut Bawah Bengkulu - Acara HUT dibuka oleh Gubernur Bengkulu (H. Helmi Hasan., SE.) - Undangan HUT sebanyak 350 orang	- Meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk pemberdayaan perempuan, - Pemberian bantuan social kepada masyarakat yang kurang dan tidak mampu, - Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga pemberdayaan perempuan

**-LAPORAN PELAKSANAAN DANA DAK BIDANG PPKTP DANA
PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI BENGKULU SALUR TAHAP 2 TAHUN ANGGARAN 2025**

Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah Kab/Kota

Total Pagu : Rp99.225.000,-

Realisasi hingga Desember 2025 : Rp93.624.800,-

Persentase Realisasi : 94,35 %

Boppa Pencegahan

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Hasil Kegiatan
1.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan kewenangan provinsi melalui Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perlindungan Perempuan dari Kekerasan “Perempuan Berdaya, Provinsi Bengkulu Bebas Kekerasan”	-Kegiatan dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 20 Oktober 2025 -Lokasi Kegiatan Di Hotel Nala Sea Side Kota Bengkulu (Jl. Pariwisata No.13 Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu kode pos 38111) -Jumlah Peserta Sebanyak 65 org yang terdiri dari OPD terkait, Organisasi Perempuan Dll -Narsum Berasal dari Polda Bengkulu, Psikolog Klinis dan Advokat	- Pengautan Sinergi Lintas Sektor dengan Memperkuat Kolaborasi antar Lembaga Hukum, Lembaga Sosial dan instansi pemerintah untuk membangun system perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan - Mengoptimalkan layanan perlindungan bagi Perempuan dan anak tingkat provinsi serta kabupaten/kota - Menekankan pada penanganan yang lebih cepat dan tepat bagi korban
2.	Penguatan Sinergi, Kolaborasi dan aksi bersama untuk mencegah dan melindungi Perempuan dari kekerasan “PEREMPUAN BERDAYA, PROVINSI BENGKULU BEBAS KEKERASAN”	-Kegiatan dilaksanakan Pada Hari Kamis Tanggal 27 Novemer 2025 -Lokasi Kegiatan Di Hotel Nala Sea Side Kota Bengkulu (Jl. Pariwisata No.13 Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu kode pos 38111) -Jumlah Peserta Sebanyak 90 org yang terdiri dari OPD terkait, Organisasi Perempuan Dll -Narsum Berasal dari Kemenkumham Provinsi Bengkulu, Psikolog Klinis, UPTD PPA Provinsi Bengkulu	-Penguatan Komitmen Lintas Sektor untuk membangun sinergi antar berbagai instansi -Hasil Utama Kegiatan ini meliputi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan program untuk Pencegahan kekerasan Fisik, Psikis, Seksual maupun Gender dan memperkuat jaringan Masyarakat dan Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) -Pemberdayaan Perempuan Sebagai Agen Perubahan (kegiatan ini menekankan bahwa Perempuan yang berdaya Adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman

- Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Total Pagu : Rp

274.771.000,-

Realisasi hingga Desember 2025 : Rp 226.731.000,-

Persentase Realisasi : 82,52 %

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Hasil Kegiatan
1.	Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap(PSL) untuk Ketuadan Pengurus Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bengkulu	-Kegiatan Pengadaan dilaksanakan PadaBulanMaret 2025sebelum dilaksanakan pengukuhan Ketuadan Pengurus BKOW Provinsi Bengkulu. -Lokasi Kegiatan Pengukuhan DiBalaiRaya Semarak Bengkulu.	-Tujuan dilaksanakannya pengukuhan pengurus BKOW Bengkulu adalah untuk mengesahkan kepengurusan baru agar dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun Bengkulu secara lebih efektif. -Agar BKOW menjadi penggerak utama dalam menyuarakan aspirasi perempuan dan mendukung program daerah melalui inovasi dan kolaborasi.
2.	Pengadaan Batik Tradisional untuk Ketua dan Pengurus Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bengkulu serta Dinas P3APPKB	-PenerimaBatik Tradisional terdiri dari BKOW dan DP3APPKB	-Penguatan Komitmen Lintas Bidang untuk membangun sinergi antar berbagai instansi terkait.
3.	Kegiatan Pertemuan Peningkatan Peran Serta Organisasi Wanita dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	-Kegiatan dilaksanakan Pada Hari Jumat Tanggal 7 November 2025 -Lokasi Kegiatan Di Hotel Nala Sea Side Kota Bengkulu (Jl. Pariwisata No.13 Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu kode pos 38111) -JumlahPeserta Sebanyak 50 org yang terdiri dari OPD terkait, Organisasi Perempuan Dll -Narsum Berasal dari Ketua BKOW Prov Bengkulu, Kepala DP3APPKB Prov Bengkulu, Yayasan PUPA Bengkulu serta Kabid PPKTP DP3APPKB	-Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan organisasi perempuan mengenai isu kekerasan terhadap perempuan. -Menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab social dalam menciptakan lingkungan aman bagi perempuan
4.	Paket Sembako	-Kegiatan dilaksanakan pada bulan November dan awal Desember tahun 2025 - Jumlah penerima manfaat untuk paket sembako ini yaitu 166 orang/paket	-Bantuan ini diberikan bertujuan untuk meringankan kesulitan hidup masyarakat yang membutuhkan
5.	Rapat kegiatan	-Kegiatan rapat ini didukung oleh makan minum rapat	-Penyerahan bansos merupakan rangkaian peringatan hari ibu sebagai bentuk bentuk kepedulian terhadap perempuan rentan dan korban kekerasan -Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ibu yang ke-97 Tahun dengan tema Perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia 2045.

6.	Perjalanan Dinas Biasa	-Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan undangan dari GOWKabupaten dan juga untuk sinkronisasi dan koordinasi layanan perlindungan perempuan pada Kabupaten. -Dilaksanakan di Kepahiang, Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Lebong, Bengkulu Tengah. -Narsum Berasal dari Kemenkumham Provinsi Bengkulu, Psikolog Klinis, UPTD PPA Provinsi Bengkulu	-Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan yang telah dilakukan daerah untuk meningkatkan upaya koordinasi dan jejaring kerja, kelembagaan, sosialisasi, advokasi fasilitasi. -Diharapkan BKOW dan GOW Kabupaten dapat berkoordinasi dan kolaborasi guna meningkatkan peran strategis dalam pembangunan
----	------------------------	--	---

Permasalahan dan kendala yang dihadapi bidang PPKTP yaitu :

3. Faktor budaya yang mengakar kuat (Patriaki dan anggapan AIB) dan rasa takut dan malu untuk melaporkan tindak kekerasan (Speak UP).

Upaya dan Solusi yang di harapkan yaitu :

4. Edukasi sejak dini tentang kesetaraan gender dan hak asasi, pemberdayaan ekonomi perempuan dan penguatan sistem layanan pengaduan seperti (SAPA 129), pendampingan hukum dan psikologis serta reformasi kebijakan melalui kolaborasi antar lembaga dan perubahan budaya patriaki Solusi : Penguatan legislasin dan implementasi hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat, merubah narasi sosial tentang maskulinitas dan feminitas serta menantang praktik budaya seperti perkawinan anak.

3. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Nama Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Persentase capaian		Realisasi Kinerja / Capaian Kinerja 2025	Permasalahandan Kendala	Solusi / Masukan
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)			
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Terlaksananya koordinasi TPPS di tingkat provinsi dilaksanakan dalam bentuk: pertemuan, koordinasi, fasilitasi, konsultasi, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung Aksi Konvergensi percepatan penurunan stunting.	200.000.000	164.986.485	Kegiatan dilaksanakan 4 (empat) kali: 1) Pemantauan pelaksanaan Aksi Konvergensi; 2) Pelaksanaan Rembuk Stunting provinsi; 3) Fasilitasi penandaan (tagging) APBD provinsi yang mendukung penurunan stunting; 4) Kegiatan yang melibatkan lintas instansi dalam upaya mendukung percepatan penurunan stunting.	Terdapat kendala pelaksanaan kegiatan karena terjadi pergeseran RAK dan SPD.	Mengusulkan RAK sesuai dengan usulan awal
2.	Sub Kegiatan Pengembangan	Terlaksananya Kegiatan	32.000.000	25.499.400	Tersedianya Dokumen Hasil Pengembangan	Keterbatasan Penerima	Memperluas

	Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Manfaat (Keluarga Resiko Stunting) untuk meningkatkan kualitas keluarga	jangkauan dan pelaksanaan Kegiatan sehingga banyak KRS yang dapat disentuh
3.	Sub Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	233.000.000	182.411.000	Tersedianya Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan karena penambahan anggaran kegiatan di APBD-P	Pelaksanaan kegiatan disulitkan pada APBD murni
4.	Sub Kegiatan Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	26.448.200	16.087.800	Tersedianya Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kendala dalam penghipunan data dikarenakan data yang dibutuhkan ada pada OPD terkait.	Membuat komitmen dengan OPD terkait dalam pemberian dukungan data

PERMASALAHAN DAN KENDALA

Permasalahan dan Kendala yang di hadapi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

- Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- Adanya Surat Imbauan dari Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nomor : B.000.3/3/B.4/2025, tanggal 26 Februari 2025, sebagai berikut :
 - Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk tidak melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (Tender, Non Tender dan E-Purchasing);
 - Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan memerintahkan: Kelompok Kerja Pemilihan untuk tidak melakukan kegiatan PengadaanBarang/Jasa (Tender, Penunjukan Langsung, dan Seleksi);
 - Pejabat Pengadaan untuk tidak melakukan kegiatan PengadaanBarang/Jasa (Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan E-Purchasing)
- Adanya pergeseran anggaran (APBD Pergeseran) pada bulan April tahun 2025.

4. Efisiensi anggaran APBD berpengaruh pada Rencana Anggaran Kas yang sudah di input dan direncanakan sebelumnya. RAK Kegiatan tersebut baru tersedia di bulan oktober 2025 sehingga kegiatan yang seharusnya akan direalisasikan tidak dapat direalisasikan.
5. Setelah ditindak lanjuti RAK bergeser ke bulan Juni namun pada pertengahan bulan Oktober terjadi perubahan RAK ke bulan Desember sehingga tidak dapat merealisasikan keuangan dan kegiatan.
6. Terjadinya pergantian Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada bulan juli sehingga membutuhkan waktu untuk perubahan Akun pada SIPD, E-Purchasing dan akun lainnya.
7. Sering terjadi gangguan pada Aplikasi SIPD
8. Adanya perubahan atau perpindahan Aplikasi E-Purchasing SPSE versi 5 ke versi 6 menyebabkan keterlambatan administrasi keuangan.
9. Terjadinya pergantian Pejabat Penatausahaan Keuangan yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan

Upaya dan Solusi

1. Langkah yang sudah/akan dilakukan pada Bulan Desember 2025 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan, namun secara anggaran tidak merealisasikan seluruh belanja.
2. Membuat rencana kerja sesuai dengan dokumen perencanaan dan keuangan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Kas yang sudah di tetapkan.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (KB) :
 - Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB, terutama di daerah terpencil dan terluar.
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB melalui kampanye dan edukasi.
4. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk :
 - Meningkatkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana dan peningkatan kesadaran masyarakat.
 - Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian penduduk.
5. Peningkatan Kualitas Data Penduduk
 - Meningkatkan kualitas data penduduk melalui sistem informasi kependudukan yang lebih akurat dan terintegrasi.
 - Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas data penduduk.

6. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program

- Melakukan rapat koordinasi minimal 2 kali setahun dengan mengundang DP3AP2KB Kabupaten/Kota untuk meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas program.

7. Pemantauan Langsung Pelaksanaan Bangsa Kencana

- Melakukan pemantauan langsung pelaksanaan program Bangsa Kencana di tingkat masyarakat untuk memastikan implementasi program yang efektif dan efisien.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi program Bangsa Kencana.

8. Pelaksanaan Perayaan HARGANAS

- Tetap melaksanakan perayaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) dengan suport anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perayaan HARGANAS untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga berencana dan pengendalian penduduk.

4. BIDANG PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPH dan PA)

No	Nama Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Persentase capaian		Realisasi Kinerja / Capaian Kinerja 2025	Permasalahan dan Kendala	Solusi / Masukan
			PAGU	REALISASI			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya kesepakatan 10 kab/kota terhadap KLA	79.131.000	56.446.900	Masih terdapat 3 kab yang belum mendapatkn sertifikat KLA	Masih perlunya koordinasi antar lintas OPD dan lintas sektor dalam pengisian Evaluasi Mandiri Penilaian KLA	Peran aktif gugus tugas provinsi dalam melakukan sosialisasi terhadap penilaian KLA
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya kegiatan layanan kualitas hidup anak di LPKA Bengkulu	81.415.000	61.289.900	Masih adanya anak yang belum mendapatkan kebebasan terhadap hak-hak mereka seperti hak sipil dan hak kesehatan	Masih terdapat anak LPKA yang belum memiliki kebebasan hak sipil yaitu Kartu Identitas Anak sebanyak 4 orang anak didikan dan 1 orang anak didik yang memiliki masalah kesehatan belum dapat tertangani secara maksimal	koordinasi terhadap lintas sektor dalam pemenuhan hak anak
	Koordinasi dan Sinkronisasi	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	62.275.000	60.875.000	Anak memahami cara mengatasi	Masih adanya perilaku bullying	Peran aktif lintas stakeholder

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota di SMA N 1 dan SMA N 6 Kota Bengkulu			kekerasan baik itu bullying di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, menurunnya angka kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dan masyarakat.	disekolah yang perlu diperhatikan bersama bukan hanya menjadi tanggungjawab guru tapi peran sesama teman sekolah harus lebih peka	dalam pencegahan kekerasan anak
--	--	--	--	---	---	---------------------------------

Permasalahan dan kendala :

1. Kurangnya kebijakan dan dukungan dari pemerintah dalam membentuk DRPPA
2. Belum maksimalnya sinergitas antara OPD dan Lembaga Non Pemerintah dalam mewujudkan KLA
3. Pemenuhan hak anak di LPKA belum terpenuhi dibuktikan dengan masih adanya penyakit anak yang tidak ditanggung jaminan kesehatan (BPJS) serta kurangnya sarana air bersih.
4. Komitmen stake holder dalam pencegahan kekerasan terhadap anak masih kurang.
5. Kegiatan Inovasi “ Gahwin Anak Melalui Linda ” belum begitu berjalan karena dukungan sumber dana yang belum ada. Walaupun belum ada dukungan dana tersebut inovasi ini masih masuk dalam inovasi daerah mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

Langkah yang sudah dilakukan :

1. SUB BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

Kegiatan penandatanganan nota kesepakatan bersama dan rapat koordinasi penguatan gugus tugas percepatan perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak menuju Provinsi Bengkulu Layak Anak. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2025, di hotel madeline kota Bengkulu. Tujuan kegiatan ini untuk menciptakan komitmen bersama dan memberikan pemahaman kepada seluruh gugus tugas KLA dalam penilaian KLA.

Kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dengan sasaran masyarakat dan lembaga masyarakat. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2025 telah dilaksanakan Hal ini bertujuan untuk membentuk Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam upaya memperluas lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak.

Kegiatan kunjungan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan tujuan monitoring upaya pemenuhan hak anak bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum di LPKA Kota Bengkulu. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 05 Desember 2025.

2. SUB BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak telah dilakukan sebanyak 2 kali pada tanggal 9 Desember 2025 dan 12 Desember 2025 yang bertempat di SMAN 1 Bengkulu dan SMAN 6 Bengkulu. Kegiatan ini menyasar pada siswa-siswi dan guru BK. Tujuan kegiatan ini untuk menurunkan angka kekerasan/bullying terhadap anak.

Berdasarkan data Aplikasi simponi UPTD DP3APPKB di bawah ini, masih tingginya angka kekerasan terhadap anak-anak. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di lingkungan sosial masyarakat dan pendidikan.

Tabel 3.4 : Data Kekerasan Terhadap Anak Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/Kota	Tahun	
		2024	2025
1	Kota Bengkulu	9	26
2	Bengkulu Selatan	10	16
3	Bengkulu Utara	48	26
4	Bengkulu Tengah	18	20
5	Kaur	20	20
6	Seluma	30	17
7	Kepahyang	31	21
8	Rejang Lebong	70	55
9	Lebong	8	10
10	Muko muko	10	11
	Total	254	222

Sumber Data : Aplikasi Simponi UPTD DP3APPKAB Provinsi Bengkulu

Kekerasan terhadap anak-anak terjadi di karenakan beberapa hal antara lain anak-anak belum memahami pentingnya hukum dan peraturan dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan, perilaku positif anak masih kurang, rasa tanggungjawab anak-anak yang kurang sehingga mereka belum memiliki rasa tanggungjawab untuk mematuhi hokum dan peraturan. Dan anak-anak belum memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara dan menjadi warga Negara yang baik. Penguatan akhlak adalah perilaku dan karakter yang ditunjukkan oleh anak-anak dalam berinteraksi dengan orang lain, lingkungan dan diri sendiri

INOVASI

Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak memiliki inovasi yang setiap tahun di usulkan dalam Inovasi Daerah yaitu Inovasi “GAHWIN ANAK MELALUI MOLINDA”

GAHWIN ANAK MELALUI MOLINDA adalah Gerakan Pencegahan atau Upaya Pencegahan Perkawinan usia anak dengan sarana Mobil Perlindungan (Molin) yang merupakan fasilitas transportasi darat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu. Mobil Perlindungan ini dapat di pakai sebagai sarana Sosialisasi, Penjangkauan, Advokasi, dan Pelaksanaan *Penyuluhan* untuk semua Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak. GAHWIN ANAK MELALUI MOLINDA merupakan salahsatu gerakan kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak. Merupakan salah satu dari lima arahan Presiden yang dimandatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang telah diturunkan menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia sehingga merupakan kewajiban bagi seluruh daerah di Indonesia, Provinsi Bengkulu telah menggariskan amanah ini ke dalam Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2018. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan di Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu dengan melibatkan Seluruh Satuan Pendidikan, Tim Penggerak PKK, Organisasi Perangkat Daerah, Kementerian Agama, Lembaga Masyarakat Peduli Anak, Media Massa dan Dunia Usaha serta Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini diupayakan pelaksanaan diseluruh Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Dengan harapan agar Dinas P3APPKB Kabupaten dapat melanjutkan kegiatan ini ditingkat desa atau kelurahan yang ada di wilayah kerja masing-masing, Yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga mitra yang peduli anak.

GAHWIN ANAK MELALUI MOLINDA tidak memiliki lambang khusus karena sarana yang dipakai adalah sarana transportasi yaitu Mobil Perlindungan adapun kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan antara lain:

1. Sosialisasi dengan berkunjung ke sekolah-sekolah. Untuk tahap awal sudah dilaksanakan disekolah tingkat atas.
 2. Sosialisai dengan metode penyebaran informasi di jalan-jalan dengan pengeras suara yang ada dimobil perlindungan.
 3. Selalu menyelipkan materi tentang pencegahan perkawinan usia anak disetiap kesempatan dalam kegiatan baik yang dilakukan di OPD Dinas P3APPKB Provinsi atau di OPD lain, dengan tujuan penyebaran informasi tentang pencegahan perkawinan usia anak.
 4. Membuat kerjasama dengan media elektronik yang ada di Provinsi Bengkulu, antara lain TVRI Bengkulu untuk membuat suatu acara siaran langsung terkait informasi penting upaya pencegahan perkawinan usia anak dan bahaya-bahaya nya.
- Tujuan inovasi
1. Menumbuhkan kepedulian dan peran aktif semua stakeholder dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak.
 2. Semua satuan pendidikan menjadi satuan pendidik ramah anak dengan mengedepankan Responsif hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Mengajak semua unsur masyarakat dan pemerintah untuk PEDULI dengan keberlangsungan hidup, tumbuh kembang dan partisipasi anak sehingga anak terlindungi dan terpenuhinya hak-hak anak.

- Manfaat yang diperoleh

1. Semua stakeholder menjadi peduli dan berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak.
2. Anak dan orang tua mendapatkan informasi yang baik dan benar tentang bahaya perkawinan usia anak.
3. Terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak bisa hidup tumbuh dan berkembang secara optimal

- Hasil Inovasi

1. Menurunkan angka dipensi perkawinan usia anak.
2. Orang tua dan masyarakat peduli anak dan berupaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak.
3. Semua anak bilang TIDAK untuk perkawinan usia anak.

REKOMENDASI TAHUN BERIKUTNYA

1. Dilaksanakan pelatihan bagi SDM untuk mendapatkan sertifikat konveksi hak anak
2. Tersedianya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak dan tercapainya Provinsi Layak Anak
3. Adanya komitmen pengambil keputusan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak
4. Adanya sinergitas antar OPD dan Lembaga Non Pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak
5. Memaksimalkan pelayanan kesehatan di LPKA
6. Adanya komitmen para stake holder dalam mengurangi angka kekerasan/bullying terhadap anak (gencarnya melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah)
7. Adanya dukungan untuk mendukung terlaksananya inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

5. UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)

Bengkulu sebagai salah satu Provinsi yang ada di Indonesia tidak lepas dari isu kekerasan yang menysar Perempuan dan Anak. Dengan jumlah penduduk 2.032.940 Jiwa, diantaranya laki-laki 1.039.928 Jiwa, Perempuan 993.014 Jiwa, Anak Usia 0-18 Tahun sebanyak 660.995. Fenomena Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang masih marak terjadi di Provinsi Bengkulu perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah maupun elemen masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ternyata selama ini lebih banyak dari yang telah dilaporkan. Hal ini bukan saja disebabkan oleh takutnya korban untuk melaporkan kekerasan yang

dialami, namun juga karena sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak untuk mengadukan kasus kekerasan yang mereka alami. Oleh karenanya, Negara, melalui Dinas PPA ataupun UPTD PPA berusaha menghadirkan diri sedekat mungkin dengan masyarakat. Namun karena berbagai keterbatasan, Pemerintah juga telah berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan bagi korban kekerasan. Pemerintah/Pemda mendorong peran serta masyarakat untuk membantu dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, diantaranya melalui Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA). Satgas PPA berperan untuk membantu dalam mencegah, menjangkau, dan mengidentifikasi kasus kekerasan perempuan dan anak. Satgas PPA hadir untuk membantu dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, diantaranya melalui penjangkauan korban, identifikasi kasus, perlindungan di lokasi kejadian, pengungsian sementara, serta melakukan rekomendasi. Adapun Satgas PPA merupakan relawan yang menjadi mitra pemerintah untuk membantu dalam perlindungan perempuan dan anak. Untuk laporan kinerja UPTD PPA Provinsi Bengkulu selama 4 (empat) tahun terakhir tergambar pada data berikut :

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025	CAPAIAN KINERJA 2025
1	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan yang Mendapatkan layanan pendampingan	97,5	97,5
	Menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Persentase stake holder yang diberikan penguatan dan pengembangan pelayanan perlindungan perempuan	100	100
	Menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	97,5	97,5
2	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan layanan pendampingan	95	95
	Menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat provinsi	Jumlah forum komunikasi pendampingan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	1 Kali	2 kali

	Menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase stake holder yang diberikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	100
--	---	--	-----	-----

DATA KASUS YANG TERLAYANI TAHUN 2021 SD 2025

1) Tahun 2021

- Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah **198 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani adalah **198 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap anak adalah **143 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap anak yang terlayani adalah **143 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa perempuan adalah **54 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa Perempuan yang terlayani adalah **54 Kasus**

2) Tahun 2022

- Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah **259 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani adalah **259 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap anak adalah **175 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap anak yang terlayani adalah **175 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa perempuan adalah **87 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa Perempuan yang terlayani adalah **87 Kasus**

3) Tahun 2023

- Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah **370 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani adalah **370 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap anak adalah **241 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap anak yang terlayani adalah **241 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa perempuan adalah **132 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa Perempuan yang terlayani adalah **132 Kasus**

4) Tahun 2024

- Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah **271 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani adalah

271 Kasus

- Total Kasus Kekerasan terhadap anak adalah **179 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap anak yang terlayani adalah **179 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa perempuan adalah **93 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa perempuan yang terlayani adalah **93 Kasus**

5) Tahun 2025

- Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah **296 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani adalah **296 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap anak adalah **211 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap anak yang terlayani adalah **211 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa perempuan adalah **85 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa perempuan yang terlayani adalah **85 Kasus**

6. SEKRETARIAT

Gambar 3.1 : Hasil LHE AKIP Inspektorat DP3APPKB Tahun 2025

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025				
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,50	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82,30	78,25
			A	BB

No	Catatan
1	Nilai total Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 adalah 82,30 atau berpredikat A (Memuaskan)
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 adalah 78,25 atau berpredikat BB (Sangat Baik)
3	Sehingga terjadi penurunan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 4,05

No	Rekomendasi
1	Terkait kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja agar : a. Dokumen perencanaan kinerja memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting tidak ada) b. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja c. Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan tepat waktu
2	Terkait keberadaan, kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja agar : Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
No	Rekomendasi
3	Terkait kualitas dan pemanfaatan pelaporan kinerja agar : a. LAKIN menjadi kepedulian seluruh pegawai/Tidak ada notulen rapat pembahasan capaian realisasi LAKIN Tahun 2024 dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 b. Informasi dalam LAKIN dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
4	Terkait kualitas dan pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Sumber data : Inspektorat Provinsi Bengkulu

LEMBAR KERJA EVALUASI
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		23,70	79,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,4	5,40	90,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	6,3	6,30	70,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12	12,00	80,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		22,50	75,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,8	4,80	80,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,2	7,20	80,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,5	10,50	70,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		11,55	77,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,7	2,70	90,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,6	3,60	80,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	5,25	70,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,50	82,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,5	4,50	90,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25	6,00	80,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10	10,00	80,00%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan 2025 :

No	Nama Sub Kegiatan	Jumlah Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Sisa Pagu 2025 (Rp)	Persentase
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	105.000.000	61.360.238	43.639.762	58,4
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000	5.650.000	14.350.000	28,2
3.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	20.000.000	10.790.000	9.210.000	53,9
4.	Penyediaan gaji dan tunjangan	8.566.911.960	8.416.083.281	150.828.679	98,2
5.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	67.200.000	42.480.000	24.720.000	63,2
6.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	9.600.0000	9.600.000	0	100
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000	20.000.000	0	100
8.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000	29.999.000	1.000	99,9
9.	Penyediaan peralatan rumah tangga	35.000.000	2.400.000	32.600.000	6,8

10.	Penyediaan bahan logistik kantor	45.000.000	44.978.000	22.000	99,9
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000	25.000.000	0	100
12.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0
13.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	99.400.000	55.128.896	44.271.104	55,4
14.	Pengadaan Mebel	985.896.000	0	985.896.000	0
15.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100.000.000	99.205.300	794.700	99,2
16.	Penyediaan jasa surat menyurat	6.700.000	6.440.000	260.000	96,1
17.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	123.000.000	100.367.380	22.632.620	81,5
18.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8.160.0000	7.480.000	680.000	91,6
19.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	293.000.000	247.360.800	45.639.200	84,4
20.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	70.575.000	37.449.720	33.125.280	53
21.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	90.700.000	75.894.010	14.805.990	83,6
22.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.000.000	10.000.000	0	100
23.	Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	38.053.000	37.456.000	597.000	98,4
24.	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	495.377.190	453.899.678	41.477.512	91,6
25.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi	99.225.000	93.614.800	5.610.200	94,3
26.	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	179.950.000	154.181.925	25.768.075	85,6
27.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	170.820.000	157.854.500	12.965.500	92,4
28.	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	34.510.000	34.509.000	1.000	99,9

29.	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi	35.000.000	33.369.000	1.631.000	95,3
30.	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	274.771.000	226.961.321	47.809.679	82,6
31.	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	32.000.000	25.499.400	6.500.600	79,6
32.	Penyediaan data gender dan anak provinsi	21.790.000	21.350.000	440.000	97,9
33.	Koordinasi dan sinkronisasi pelemagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi	79.131.000	56.409.400	22.721.600	71,2
34.	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	81.415.000	59.079.000	22.336.000	72,5
35.	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	62.275.000	59.181.800	3.093.200	95
36.	Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK kewenangan provinsi	120.710.000	88.388.925	32.321.075	73,2
37.	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK kewenangan	34.510.000	34.475.900	34.100	99,9
38.	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga kencana)	233.000.000	182.411.000	50.589.000	78,2
39.	Penyusunan profil program, pengembangan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga kencana)	26.448.200	14.567.800	11.880.400	55
40.	Fasilitasi kerjasama dengan stake holder dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE program bangga kencana	200.000.000	164.986.485	35.013.515	82,4
JUMLAH		12.950.128.350	11.205.862.559	1.744.265.791	86,5

Dari rincian akuntabilitas keuangan diatas yang mendukung program kerja dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu terdiri dari 40 sub kegiatan dengan realisasi sebagai berikut :

Pagu : Rp. 12.950.128.350,-

Realisasi : Rp. 11.205.862.559

Sisa Pagu : Rp. 1.744.265.791

Persentase : 86,5 %

Dari 40 sub kegiatan yang mendukung program kerja dan kinerja ada 13 sub kegiatan yang realisasi dan penyerapan kurang dari 80 % hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Pencairan UP dimulai dibulan mei sehingga tidak sesuai dengan aliran kas yang telah disusun dan menyebabkan mundurnya pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya Surat Imbauan dari PJ. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, nomor : B.000.3/3/B.4/2025 Tanggal 26 Februari 2025, sebagai berikut
 - Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk tidak melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa (Tender, Non tender dan E-Purchasing)
 - Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan memerintahkan: Kelompok Kerja Pemilihan untuk tidak melakukan kegiatan PengadaanBarang/Jasa (Tender, Penunjukan Langsung, dan Seleksi)
 - Pejabat pengadaan untuk tidak melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa (penunjukan langsung, pengadaan langsung dan e-purchasing.
3. Perubahan jadwal tahapan apbd
4. Pekerjaan pengadaan mebel sepaket dengan pengadaan rehab kantor. Karena pekerjaan rehab tidak jadi dijalankan terkait efisiensi, sehingga kegiatan pengadaan mebel juga tidak jadi dijalankan.
5. Adanya perintah dari pusat efisiensi anggaran sehingga rencana kegiatan harus disusun kembali, serta adanya pergantian pejabat keuangan (PA dan PPK) sehingga menyebabkan terhambatnya pengajuan pencairan. Selain itu, salah satu dana yang tidak terealisasi yaitu sewa hotel untuk korban kekerasan karena berkurangnya korban dan korban ada beberapa yang menolak untuk ditempatkan di hotel sebagai tempat sementara untuk menghadapi kasus kekerasan yang sedang berlangsung
6. Adanya Pergeseran anggaran pada Bulan April Tahun 2025
7. Efisiensi anggaran APBD berpengaruh pada Rencana Anggaran Kas yang sudah di input dan direncanakan sebelumnya. RAK Kegiatan tersebut baru tersedia di bulan oktober 2025 sehingga kegiatan yang seharusnya akan direalisasikan tidak dapat direalisasikan. Setelah ditindak lanjuti RAK bergeser ke bulan Juni namun pada pertengahan bulan Oktober terjadi perubahan RAK ke bulan Desember sehingga tidak dapat merealisasikan keuangan dan Kegiatan
8. Keterbatasan Waktu untuk pelaksanaan Kegiatan.
9. Pindah Lokus Kegiatan dikarenakan Cuaca Ekstream yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan di Pulau Enggano

BAB IV

PENUTUP

Akutabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara priodik atau akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu beserta target dan capaian realisasinya.

Terdapat beberapa tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja yaitu :

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator
1.	Tujuan 1 : Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi Sasaran 1 : Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi
2.	Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan serta TPPO Sasaran 2 : Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan
3.	Tujuan 3 : meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta TPPO Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan
4.	Tujuan 4 : meningkatnya laju pengendalian pertumbuhan penduduk Sasaran 4 : Meningkatnya kesehatan reproduksi	Total Fertility Rate (TFR) angka kelahiran total 15 s.d 49
5.	Tujuan 5 : Meningkatnya tata kelola kinerja DP3APPKB Sasaran 5 : Nilai Evaluasi SAKIP DP3APPKB	Nilai Evaluasi SAKIP DP3APPKB

Terdapat indikator kinerja yang belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai evaluasi SAKIP DP3APPKB capaiannya tahun 2025 BB dengan target A. Hal ini disebabkan :

- Membuat Crosscutting agar Dokumen perencanaan kinerja memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja
- Dokumen Kinerja dipublikasikan tepat waktu
- Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya melakukan pengukuran realisasi kinerja dan rencana aksinya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, yaitu pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- LAKIN menjadi kepedulian seluruh pegawai/Tidak ada notulen rapat pembahasan capaian realisasi LAKIN Tahun 2024 dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.
- Informasi dalam LAKIN dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Pencapaian realisasi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu TA. 2025 yaitu 86,5% atau sebesar Rp. 11.205.862.559,-.

Capaian beberapa indikator tahun 2025 telah berhasil yang ditandai dengan persentase capaian indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya perlu dilakukan tindak lanjut atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan, yaitu :

Adanya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan yang dilakukan pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

1. Perlu dilakukannya koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor yang diperkuat untuk mencapai keberhasilan suatu tujuan atau indikator program.
2. Pelaksanaan kegiatan/program harus memperhatikan kondisi terkini dengan memanfaatkan peluang serta memperhatikan hambatan hambatan pada tahun sebelumnya sehingga indikator kinerja dapat tercapai sebaik mungkin.
3. Pencapaian indikator program yang belum mencapai target harus menjadi prioritas dalam pencapaian indikator program pada tahun berikutnya dengan tetap mempertahankan capaian yang sudah berhasil.

4. Penyusunan rencana kegiatan harus dilakukan sebelum anggaran berjalan agar pemanfaat penggunaan anggaran APBD dapat dilakukan secara maksimal, termasuk perencanaan kegiatan melalui dana APBD Perubahan.

Saran – Saran

1. Sinkronisasi program ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota sehingga program / kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan.
2. Dalam penyusunan rencana kegiatan dapat memperhatikan kondisi terkini dengan memanfaatkan peluang dan memperhatikan hambatan hambatan pada tahun sebelumnya sehingga indikator kinerja dapat tercapai sebaik mungkin.
3. Dukungan dana yang cukup untuk setiap indikator kinerja berdasarkan capaian target yang akan dicapai.
4. Memanfaatkan semaksimal mungkin alokasi pendanaan yang ada sehingga kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja.
5. Melakukan inovasi dan terobosan baru dalam pencapaian indikator kinerja

Atas perhatian semua pihak diucapkan terimakasih.

Bengkulu, Januari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu

Ns. GUSTI MINIARTI, S.kep., MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19680801 198703 2 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Data Simfony Provinsi Bengkulu tahun 2025

No	Provinsi	Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban				Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan								Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pelayanan							
				L	P	T	Status Proses	Status Selesai	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	
1	Bengkulu	Bengkulu Selatan	23	4	21	25	22	3	9	1	9	1	4		2	25							
2	Bengkulu	Rejang Lebong	72	27	47	74	73	1	41	7	22			3	7	74	1	20	6	3	1		
3	Bengkulu	Bengkulu Utara	26	2	25	27	25	2	3	2	21			1		27	12	11	5				
4	Bengkulu	Kaur	28	10	19	29	29		19		9				1	29							
5	Bengkulu	Seluma	19	2	17	19	18	1	7	1	11			1		19		2					
6	Bengkulu	Mukomuko	21	4	17	21	20	1	6	1	12			1	1	21	11					1	
7	Bengkulu	Lebong	10	4	7	11	11		1	1	5			3	2	11					7		
8	Bengkulu	Kepahiang	25	2	23	25	8	17	8	3	17			1		25	9	1					
9	Bengkulu	Bengkulu Tengah	26	6	20	26	18	8	10	9	10			2	2	26	1	1					
10	Bengkulu	Kota Bengkulu	46	19	30	49	17	32	7	7	22	1		5	10	49	1	13	1				
Total			296	80	226	306	241	65	111	32	138	2	4	17	25	306	35	48	12	3	8	1	

Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah **296 Kasus**

Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani adalah **296 Kasus**

No	Provinsi	Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban				Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan								Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pelayanan						
				L	P	T	Status Proses	Status Selesai	Fisik	Paikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan
1	Bengkulu	Bengkulu Selatan	17	4	15	19	17	2	4	1	9	1	3		2	19						
2	Bengkulu	Rejang Lebong	50	26	26	52	51	1	26	5	21				2	52	1	13	3	2	1	
3	Bengkulu	Bengkulu Utara	20	2	19	21	19	2	1	1	19					21	8	10	5			
4	Bengkulu	Kaur	21	10	12	22	22		13		8			1	22							
5	Bengkulu	Seluma	12	2	10	12	12		2		10				12		1					
6	Bengkulu	Mukomuko	16	4	12	16	15	1	3		12			1	16	10					1	
7	Bengkulu	Lebong	9	4	6	10	10			1	5			2	2	10				7		
8	Bengkulu	Kepahiang	18	2	16	18	5	13	3	3	15				18	8	1					
9	Bengkulu	Bengkulu Tengah	15	4	11	15	12	3	5	5	9				1	15	1					
10	Bengkulu	Kota Bengkulu	33	17	18	35	14	21	5	1	17	1		2	9	35	1	10				
Total			211	75	145	220	177	43	62	17	125	2	3	5	17	220	29	35	8	2	8	1

Total Kasus Kekerasan terhadap anak adalah **211 Kasus**

Total Kasus Kekerasan terhadap anak yang terlayani adalah **211 Kasus**

No	Provinsi	Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban					Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan							Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pelayanan						
				L	P	T	Status Proses	Status Selesai	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan
1	Bengkulu	Bengkulu Selatan	23	4	21	25	22	3	9	1	9	1	4		2	25						
2	Bengkulu	Rejang Lebong	72	27	47	74	73	1	41	7	22			3	7	74	1	20	6	3	1	
3	Bengkulu	Bengkulu Utara	26	2	25	27	25	2	3	2	21			1		27	12	11	5			
4	Bengkulu	Kaur	28	10	19	29	29		19		9				1	29						
5	Bengkulu	Seluma	19	2	17	19	18	1	7	1	11			1		19		2				
6	Bengkulu	Mukomuko	21	4	17	21	20	1	6	1	12			1	1	21	11					1
7	Bengkulu	Lebong	10	4	7	11	11		1	1	5			3	2	11					7	
8	Bengkulu	Kepahiang	25	2	23	25	8	17	8	3	17			1		25	9	1				
9	Bengkulu	Bengkulu Tengah	26	6	20	26	18	8	10	9	10			2	2	26	1	1				
10	Bengkulu	Kota Bengkulu	46	19	30	49	17	32	7	7	22	1		5	10	49	1	13	1			
Total			296	80	226	306	241	65	111	32	138	2	4	17	25	306	35	48	12	3	8	1

Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah **296 Kasus**

Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani adalah **296 Kasus**

Activate Win

No	Provinsi	Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban					Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan								Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pelayanan						
				L	P	T	Status Proses	Status Selesai	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	
1	Bengkulu	Bengkulu Selatan	17	4	15	19	17	2	4	1	9	1	3		2	19							
2	Bengkulu	Rejang Lebong	50	26	26	52	51	1	26	5	21				2	52	1	13	3	2	1		
3	Bengkulu	Bengkulu Utara	20	2	19	21	19	2	1	1	19					21	8	10	5				
4	Bengkulu	Kaur	21	10	12	22	22		13		8				1	22							
5	Bengkulu	Seluma	12	2	10	12	12		2		10					12		1					
6	Bengkulu	Mukomuko	16	4	12	16	15	1	3		12			1		16	10					1	
7	Bengkulu	Lebong	9	4	6	10	10			1	5			2	2	10					7		
8	Bengkulu	Kepahiang	18	2	16	18	5	13	3	3	15					18	8	1					
9	Bengkulu	Bengkulu Tengah	15	4	11	15	12	3	5	5	9				1	15	1						
10	Bengkulu	Kota Bengkulu	33	17	18	35	14	21	5	1	17	1		2	9	35	1	10					
Total			211	75	145	220	177	43	62	17	125	2	3	5	17	220	29	35	8	2	8	1	

Total Kasus Kekerasan terhadap anak adalah **211 Kasus**

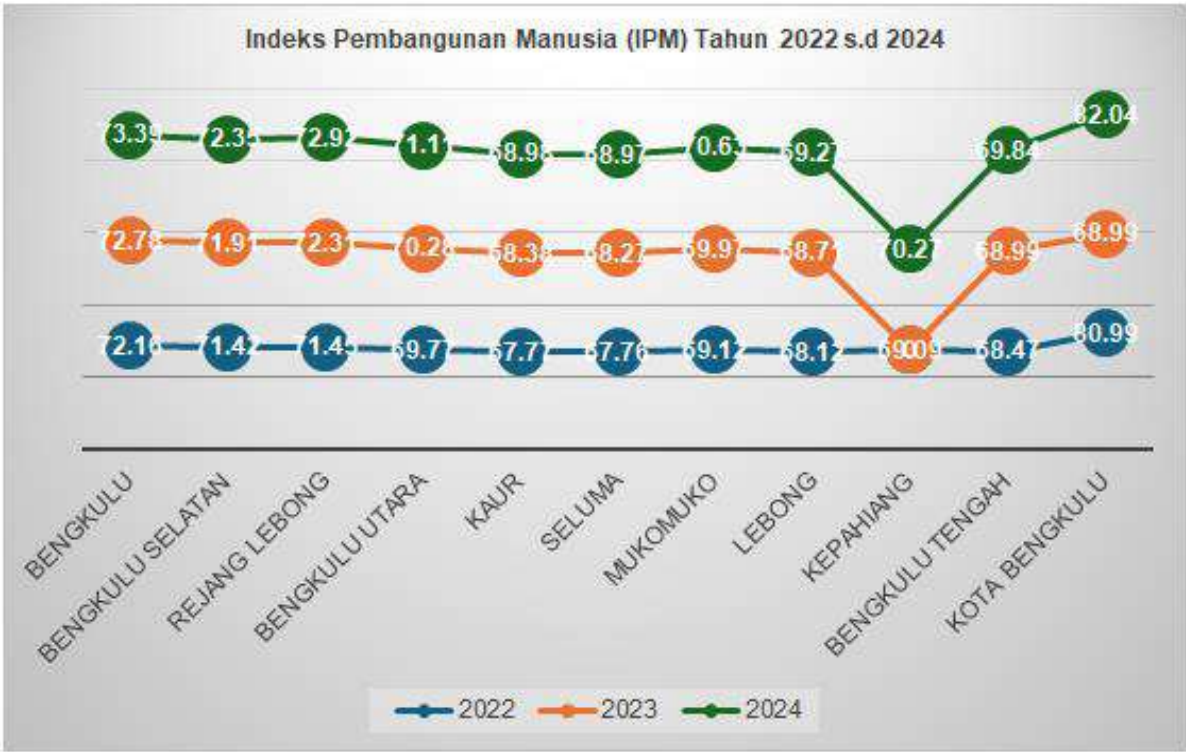
Total Kasus Kekerasan terhadap anak yang terlayani adalah **211 Kasus**

No	Provinsi	Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban				Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan							Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pelayanan							
				L	P	T	Status Proses	Status Selesai	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan
1	Bengkulu	Bengkulu Selatan	6	6	6	5	1	5				1			6							
2	Bengkulu	Rejang Lebong	22	1	21	22		15	2	1			3	5	22		7	3	1			
3	Bengkulu	Bengkulu Utara	6	6	6	6		2	1	2			1		6	4	1					
4	Bengkulu	Kaur	7	7	7	7		6		1					7							
5	Bengkulu	Seluma	7	7	7	6	1	5	1	1			1		7		1					
6	Bengkulu	Mukomuko	5	5	5	5		3	1					1	5	1						
7	Bengkulu	Lebong	1	1	1	1		1					1		1							
8	Bengkulu	Kepahiang	7	7	7	3	4	5		2			1		7	1						
9	Bengkulu	Bengkulu Tengah	11	2	9	11	6	5	5	4	1		2	1	11		1					
10	Bengkulu	Kota Bengkulu	13	2	12	14	3	11	2	6	5		3	1	14		3	1				
Total			85	5	81	86	64	22	49	15	13	0	1	12	8	86	6	13	4	1	0	0

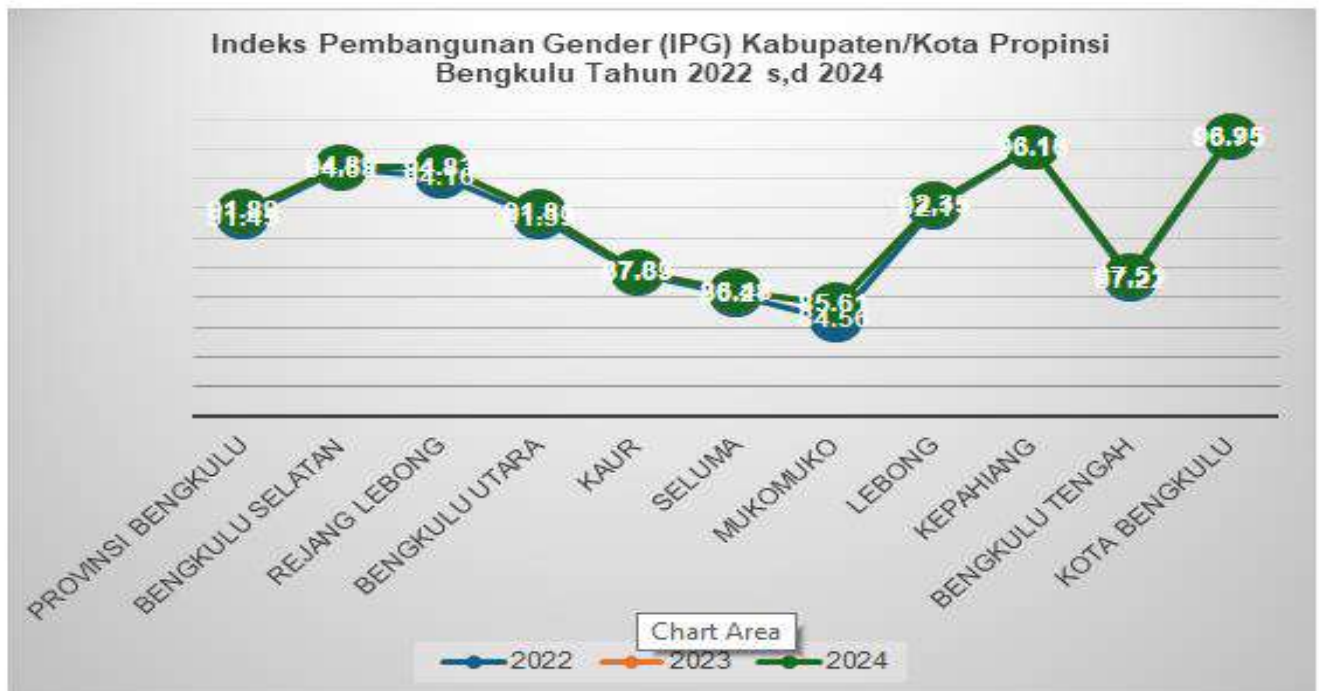
Total Kasus Kekerasan terhadap anak adalah **85 Kasus**
 Total Kasus Kekerasan terhadap anak yang terlayani adalah **85 Kasus**

Activate Win
 Go to Settings to

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022-2024



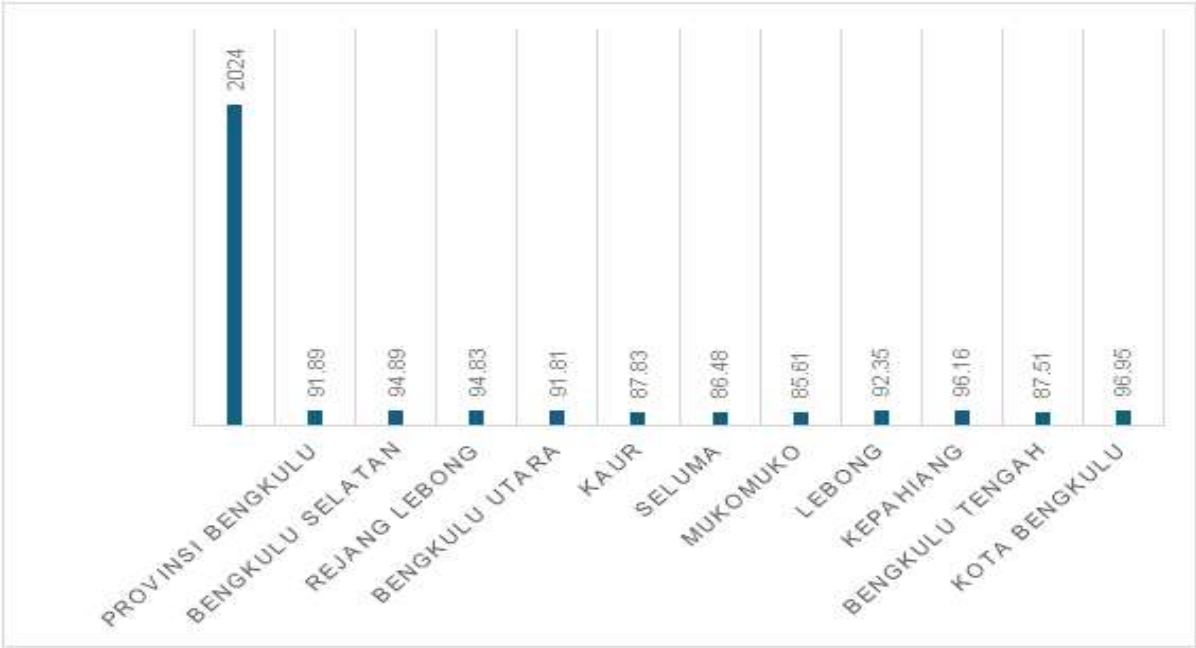
Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2022 – 2024



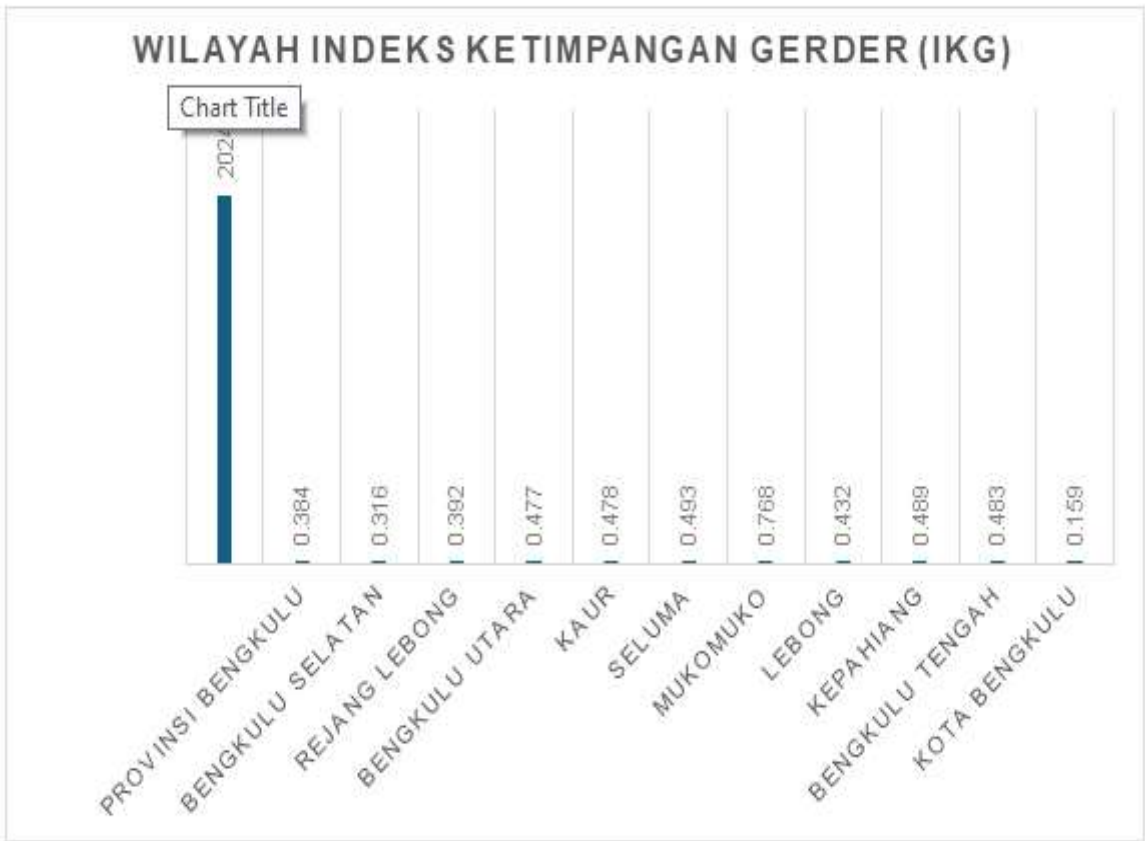
Data indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024



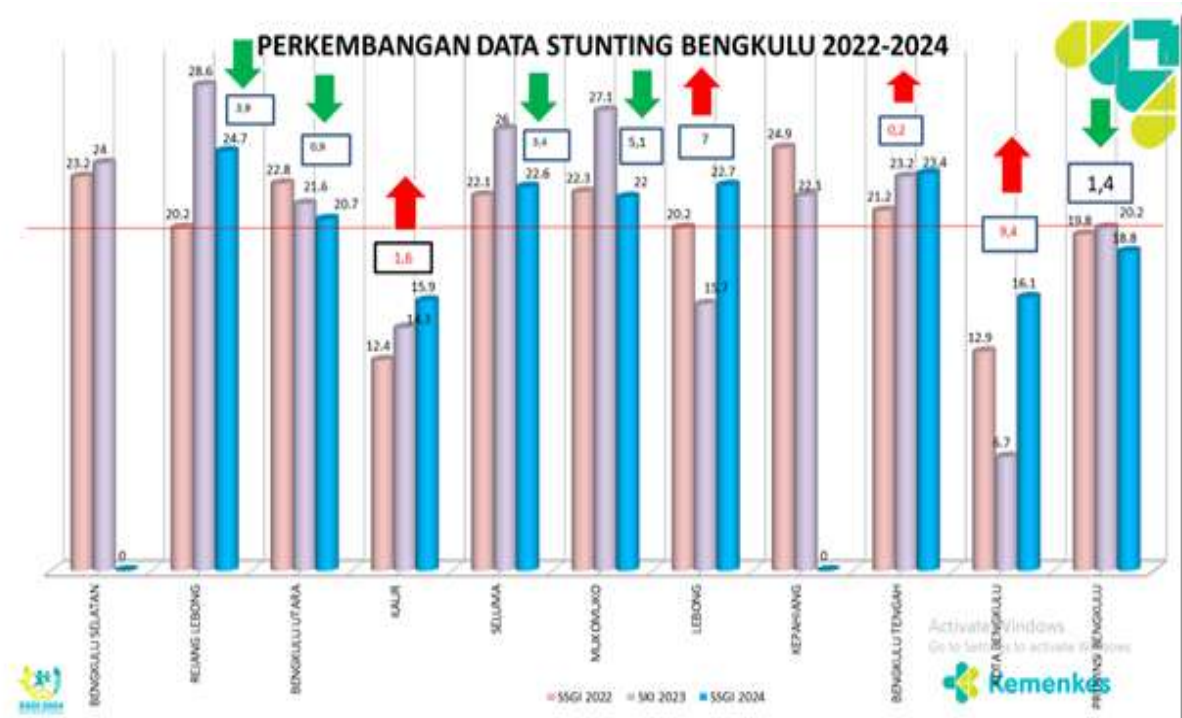
Data wilayah indeks pembangunan gender (IPG) menurut Kabupaten/Kota



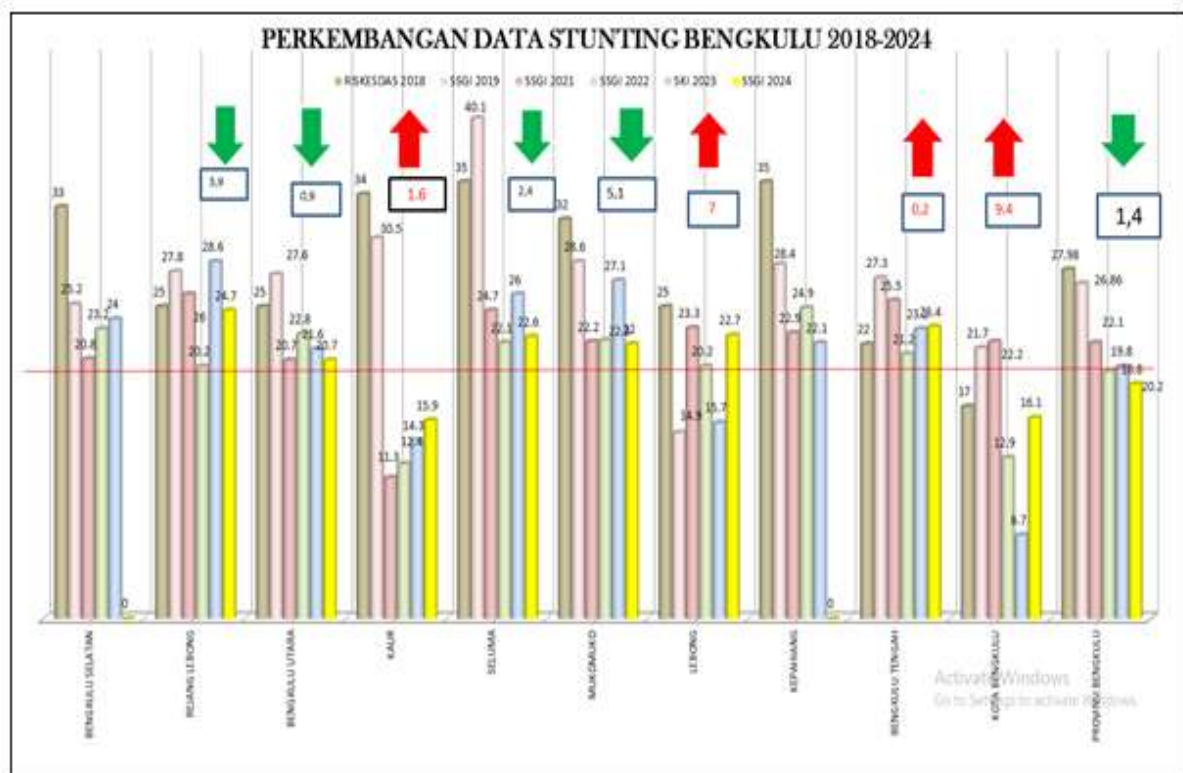
Data wilayah indeks pembangunan gender (IPG) menurut Kabupaten/Kota



Data perkembangan data stunting Bengkulu 2022-2024



Data perkembangan data stunting Bengkulu 2018-2024



Data Tren Status Gizi Balita Indonesai (2013-2024)

Tren Status Gizi Balita Indonesia (2013-2024)

Di tahun 2024 terjadi perbaikan status gizi balita Indonesia secara umum, namun prevalensi underweight meningkat

Status Gizi Balita	Hasil Riskesdas		Hasil SSGI/SKI				SSGI
	2013	2018	2019	2021	2022	2023 (SKI)	2024
Stunting	37,2	30,8	27,7	24,4	21,6	21,5	↓ 1,7 19,8
Wasting	12,1	10,2	7,4	7,1	7,7	8,5	↓ 1,1 7,4
Underweight	19,6	17,7	16,3	17,0	17,1	15,9	↑ 0,9 16,8
Overweight	11,8	8,0	4,5	3,8	3,5	4,2	↓ 0,8 3,4

Stunting: Zscore TB/U di bawah -2 SD
Wasting: Zscore BB/TB di bawah -2 SD

Underweight: Zscore BB/U di bawah -2 SD
Overweight: Zscore BB/TB di bawah +2 SD



Prevalensi masalah gizi hasil Riskesdas (2013 & 2018), SSGI (2019 – 2022), SKI 2023 dan SSGI 2024

Tren status gizi balita Indonesia

Status Gizi Balita	Hasil Riskesdas		Hasil SSGI/SKI				SSGI
	2013	2018	2019	2021	2022	2023 (SKI)	2024
Stunting	37,2	30,8	27,7	24,4	21,6	21,5	↓ 1,7 19,8
Wasting	12,1	10,2	7,4	7,1	7,7	8,5	↓ 1,1 7,4
Under weight	19,6	17,7	16,3	17,0	17,1	15,9	↑ 0,9 16,8
Over weight	11,8	8,0	4,5	3,8	3,5	4,2	↓ 0,8 3,4



Tren status gizi balita Provinsi Bengkulu

	SSGI		SKI	SSGI
	2021	2022	2023	2024
Stunting	22,1	19,8	20,2	↓ 1,4 18,8
Wasting	5,0	5,5	7,2	↓ 0,3 6,9
Under weight	12,9	12,2	10,7	↑ 4,2 14,9
Over weight	4,0	2,9	5,3	↓ 1,8 3,5

